

**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH (PSAP) NO.02 TENTANG LAPORAN REALISASI
ANGGARAN (STUDI KASUS PADA KANTOR DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL)**

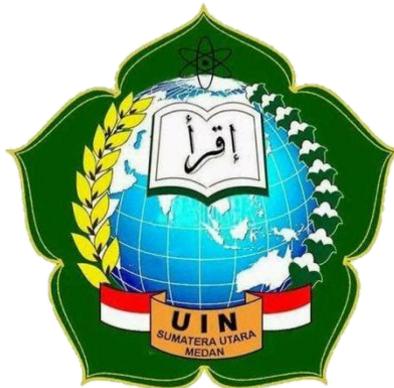
SKRIPSI

Oleh:

ADINDA SARI NASUTION

NIM. 0502171003

Program Studi : Akuntansi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA (UINSU)
M E D A N
T.A. 2021**

**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH (PSAP) NO. 02 TENTANG LAPORAN REALISASI
ANGGARAN (STUDI KASUS PADA KANTOR DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Tugas Akhir
Pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

Oleh:

ADINDA SARI NASUTION

NIM. 0502171003

Program Studi : Akuntansi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA (UINSU)
M E D A N
T.A. 2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adinda Sari Nasution
Nim : 0502171003
Semester / T.A : VIII (Delapan) / 2021
Tempat / Tgl. Lahir : Pematang Siantar / 02 Oktober 1999
Alamat : Jln. Sibaroar / Lintas barat, Panyabungan Tonga Kab.
Mandailing Natal

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :
“Analisis Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP 02 No. Tentang laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal)” adalah benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya dan saya bertanggungjawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 27 Juli 2021

Hormat Saya



ADINDA SARI NASUTION

Nim. 0502171003

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH (PSAP) NO.02 TENTANG LAPORAN REALISASI
ANGGARAN (STUDI KASUS PADA KANTOR DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL)**

Oleh :

ADINDA SARI NASUTION

NIM : 0502171003

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, 21 Juni 2021

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, SHLMA
NIP. 19790701 200912 2 003


Arnida Wahyuni Lubis, SE, M.Si
NIP. 1100000089

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah


Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, SHLMA
NIP. 19790701 200912 2 003

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQSAH

Skripsi berjudul “Analisis Penarapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal)” a.n. Adinda Sari Nasution, NIM. 0502171003 Prodi Akuntansi Syariah telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tanggal 09 Agustus 2021, skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada prodi Akuntansi Syariah.

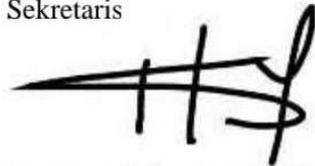
Medan, 09 Agustus 2021
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Prodi Akuntansi Syariah UIN-SU

Ketua



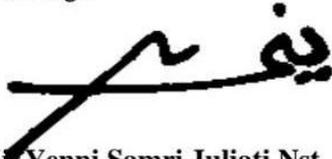
Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, S.HI, MA
NIDN. 2001077903

Sekretaris



Hendra Hermain, SE, M.Pd
NIDN. 2010057302

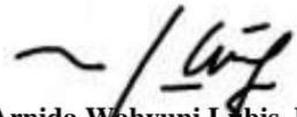
Pembimbing I



Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, S.HI, MA
NIDN. 2001077903

Anggota

Pembimbing II



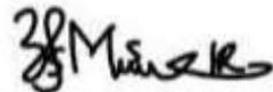
Arnida Wahyuni Lubis, M.Si
NIDN. 2016068403

Penguji I



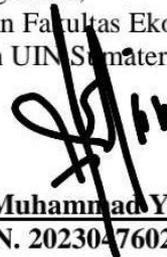
Nurbaiti, M.Kom
NIDN. 0108087908

Penguji II



Mawaddah Irham, M.E.I
NIDN. 2014048601

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Sumatera Utara Medan



Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN. 202307602

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

Ayahanda Pirgong Matua Nasution dan ibunda Muhibbah Lubis yang selalu bekerja keras dengan penuh kesabaran, berdo'a dan berkorban, dan selalu memberikan perhatian juga motivasi yang tak pernah henti-hentinya demi kesuksesan anaknya.

Kakakku Nur Asyiah Nasution, Lailam Mahrani Nasution, Abangku Muhammad Saleh Nasution dan adikku Riska Khairani Nasution serta seluruh keluargaku tercinta yang selalu memberikan motivasi, kebahagiaan hidupku, tempat berbagi suka dan dukaku.

Sahabatku serta teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang selalu mendoakan, mengorbankan waktu, mewarnai hidup sehingga semangat dan kebahagiaanku itu kembali untuk segera menyelesaikan study S-1 terima kasih untuk semua kebaikan kalian, yang telah mau berbagi dalam suka dan duka, semoga Allah SWT memberikan kesuksesan dan masa depan yang cemerlang kepada kita semua. Amiin ya Allah..

Almamaterku Angkatan 2017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

(UINSU)

ABSTRAK

Adinda Sari Nasution, Nim. 0502171003 (2021), **Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal)**. dibawah bimbingan Pembimbing Skripsi I Ibu **Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, SHI. MA** dan Pembimbing Skripsi II Ibu **Arnida Wahyuni Lubis, M. Si**.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah. SAP berbasis akrual yang ditetapkan dalam PP Nomor. 71 Tahun 2010. PP ini telah berlaku namun lembaga pemerintah masih diperkenankan memakai PP Nomor 24 Tahun 2005 SAP berbasis kas mengarah akrual, hingga dengan tahun anggaran 2014. Laporan keuangan pemerintah daerah ialah cerminan kinerja pemerintah dalam satu periode akuntansi. Kantor DPMPTSP Kabupaten Madina sudah menyusun serta menyajikan laporan keuangan pemerintah salah satu unsur laporan tersebut merupakan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang diatur dalam PSAP Nomor. 02 PP Nomor. 71 Tahun 2010. Adapun tujuan penelitian ini merupakan untuk mengenali bagaimana kesesuaian Penerapan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kantor DPMPTSP Kabupaten Madina dengan Pernyataan Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor. 02 dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 serta Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor. 02 dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di Kantor DPMPTSP Kabupaten Madina. Adapun jenis penelitian ini merupakan Pendekatan Kualitatif ini penelitian yang bersifat deskriptif serta cenderung menggunakan analisis. Jenis data yang digunakan merupakan data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan metode wawancara serta teknik dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan merupakan deskriptif kualitatif dengan daftar checklist. Penelitian ini dilakukan di Kantor DPMPTSP Kabupaten Madina yang berlokasi di di Komplek Perkantoran Bupati Payaloting Kab. Madina. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAP Nomor. 02 PP Nomor. 71 Tahun 2010 tingkatan kesesuaiannya mencapai 83% serta tingkatan kesesuaiannya mencapai 17% dengan menggunakan rumus Dean J. Champion. adapun ketidakesesuaiannya karena dalam penyusunan serta penyajian laporan realisasi anggaran Kantor Dinas Penanaman Modal serta Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tidak menyajikan pos- pos Pendapatan LRA, tidak menyajikan pos-pos transfer, tidak melakukan pemindahan saldo lebih/ kurang anggaran ke laporan perubahan saldo anggaran, tidak mencatat transaksi mata uang asing ke mata uang rupiah, tidak menyusun laporan neraca berbasis akrual. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAP Nomor. 02 PP Nomor. 71 Tahun 2010 pada Kantor DPMPTSP Kabupaten Madina dikatakan baik.

Kata kunci : PSAP Nomor 02 PP Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT. yang memberi hidup dan penghidupan, pengetahuan dan kemauan untuk menulis serta kekuatan sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) dalam Program Studi Akuntansi Syariah (AKS) pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU). Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW. beserta keluarga dan para sahabat, semoga kelak kita termasuk umat yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak. *Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaih.*

Penulis sangat menyadari bahwa ada begitu banyak pihak yang telah berperan, membantu serta memudahkan penulis dalam proses penyusunan skripsi ini disebabkan ilmu pengetahuan serta kekurangan bahan yang digunakan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. DR Syahrin Harahap, MA selaku rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU)
2. Bapak Dr. H. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU)
3. Ibu Hj. Yenni Samri Juliati Nst, SHI. MA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah dan Bapak Hendra Hermain, SE., M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah.
4. Ibu Hj. Yenni Samri Juliati Nst, SHI. MA selaku Pembimbing Skripsi I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Arnida Wahyuni Lubis, M.Si selaku Pembimbing Skripsi II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Chuzaimah Batubara, MA selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis dan memberikan nasihat.
7. Seluruh dosen dan civitas akademika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
8. Bapak Drs. Parlin Lubis, AP selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
9. Ibu Nurkhairani Hasibuan, SE selaku Kasubbag Umum Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
10. Bapak Fahrur Rozi Rangkuti, SE selaku Kasubbag Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
11. Abang Setia Budi Ginting, SE selaku Staf Honorar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
12. Ayahanda (Pirgong Matua Nasution) dan Ibunda (Muhibbah Lubis) tercinta yang telah membesarkan, mendidik, membimbing dengan ketulusan dan kasih sayang sepanjang masa serta memberikan dukungan baik materil maupun spiritual, serta ucapan terima kasih kepada kakak Nur Asyiah Nasution, dan Lailam Mahrani Nasution, abang Muhammad Saleh Nasution, adik Riska Khairani Nasution serta seluruh keluarga yang telah banyak memberikan motivasi serta bantuan selama penulis menjalani perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah A angkatan 2017 yang telah memberikan motivasi dan mendoakan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga jasa dan amal perbuatan kalian menjadi amal perbuatan kalian menjadi amal shaleh dan diberi balasan yang terbaik dari Allah SWT.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan penulis baik dalam ilmu pengetahuan, literatur, maupun pengalaman penulis, sangat berharap adanya kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari para pihak demi kesempurnaan dan pengembangan penulisan selanjutnya dan

semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya serta masyarakat secara umum.

Akhirnya, semoga amal baik yang diberikan oleh semua pihak kepada penulis mendapatkan balasan yang sebaik-bainya dari Allah SWT. *Amin ya Rabbal'alamin.*

Medan, 20 Juni 2021

Penulis,



ADINDA SARI NASUTION

NIM 0502171003

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Teoritis.....	9
1. Konsep Akuntansi.....	9
2. Konsep Akuntansi Pemerintahan.....	11
3. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP).....	12
4. Laporan Keuangan.....	14
5. Laporan Realisasi Anggaran.....	17
6. Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.02 tentang Laporan Realisasi Anggaran	26
7. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menurut Perspektif Syariah	30
B. Penelitian Terdahulu	32
C. Kerangka Konseptual.....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	36
B. Waktu dan Tempat Penelitian	36
C. Subjek dan Objek Penelitian	37

D. Sumber dan Jenis Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data.....	39
G. Sistematika Pembahasan	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Instansi	41
B. Temuan Penelitian.....	46
C. Pembahasan Penelitian.....	51
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Tabel 2.1 Laporan Realisasi Anggaran	23
2. Tabel 4.1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Gambar 1.1 Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksana Kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.....	5
2. Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	35
3. Gambar 4.1 Denah Lokasi Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	44
4. Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	45

LAMPIRAN

Lampiran

1. Lampiran 1 : Daftar Checklist.....	61
2. Lampiran 2 : Daftar Wawancara.....	64
3. Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara.....	66
4. Lampiran 4 : Laporan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	68
5. Lampiran 5 : Surat Izin Riset.....	70
6. Lampiran 6 : Surat Balasan Izin Riset	71
7. Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan setiap daerah baik di kabupaten maupun kota adalah sama sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.¹ Dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) maka setiap laporan keuangan harus sesuai dengan standar yang berlaku ini. Adanya Standar Akuntansi Pemerintah diharapkan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan di pemerintahan daerah baik itu pemerintah kabupaten maupun kota.

Dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan yang dimaksudkan adalah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga kredibilitas laporan keuangan dapat meningkat serta dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan *Good Governance* dapat tercapai. Oleh sebab itu dibuatlah peraturan yang dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan, yakni peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan.²

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 maka pemerintahan pusat, kabupaten ataupun kota diperkenankan untuk menerapkannya dalam pembuatan laporan keuangannya. Seterusnya PP tersebut dapat dijadikan sebagai acuan standar yang baku untuk diterapkan dalam lingkup pemerintahan yang wajib untuk menyusun laporan keuangan.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa: “Pemerintah menerapkan SAP berbasis

¹ Yoyo Sudaryo, dkk. *Keuangan di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2007), h. 32

² Mokhammad Irawan. “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto)”, *Journal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, ISSN: 2337-56xx. Volume:xx, Nomor:xx

akrual (Pasal 4 ayat 1)”.³ SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. SAP berbasis kas menuju akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.

PP Nomor 71 Tahun 2010 mengatur Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis kas menuju akrual yang didalamnya terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.⁴

Standar Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bertujuan untuk menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur sangat diperlukan di dalam menyusun laporan agar suatu laporan tersebut dikatakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP). Di dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan unsur-unsur sebagai berikut: (1) pendapatan-LRA; (2) belanja; (3) transfer; dan (4) pembiayaan.⁵

³ PP No. 71 Tahun 2010 Pasal 4 ayat 1

⁴ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2005), h. 139

⁵ Remy R I Palimbongan. “Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon”, *Journal EMBA*, ISSN: 2302-1174, Vol. 7 No. 4 Juli 2019, h. 4888-4897

Teori tersebut diatas seiring dengan firman Allah SAW tentang konsep tanggungjawab. Konsep ini kemudian merujuk kepada surah Al-Mudatsir ayat 38, yakni :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya :

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”⁶

Disini dijelaskan bahwa tanggungjawab seseorang berkaitan erat dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Artinya, segala sesuatu yang diperbuat harus mampu dipertanggungjawabkan perbuatannya itu. Begitu juga dengan pemerintah, semakin tinggi kedudukannya di masyarakat maka semakin tinggi pula yang akan menjadi tanggungjawabnya dengan apa yang sudah di anggarkan dalam periode pemerintahnya, serta bertanggungjawab untuk merealisasikannya. Dalam mempertanggungjawabkannya juga harus sesuai prosedur yang telah ditetapkan tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Kemudian di Kabupaten Mandailing Natal telah berdiri Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang bertempat di Komplek Perkantoran Bupati Paya Loting, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil Pra Penelitian yang dilakukan oleh penulis, Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal dalam melaksanakan kegiatan diharuskan menyusun laporan keuangan pemerintah sebagai informasi dan pertanggung jawaban.⁷

Laporan Keuangan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki laporan realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan yang berbentuk laporan, dinas tersebut

⁶ Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Mudatsir ayat 38

⁷ Wawancara dengan Bapak Setia Budi, SE; selaku Staf Honorer di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 25 September 2020, pada pukul ± 10.00 WIB

mendapatkan dana dari dana alokasi umum APBD Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian dana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seksi-seksi lain di dinas tersebut mendapatkan dana dari bagian keuangan dinas tersebut melalui pencairan dana Uang Persediaan (UP), kemudian UP dibuatkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) per kegiatan dan digantikan menjadi Ganti Uang (GU) sampai kemudian dicatatkan dalam laporan realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan Kabupaten Mandailing Natal.⁸

Namun pada kenyataannya Kassubbag Keuangan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang menyusun laporan keuangan masih kurang memahami akuntansi pemerintahan. Hal tersebut diketahui penulis ketika penulis melakukan pra penelitian di lapangan pada hari Jum'at, tanggal 25 September 2020 ketika penulis menjumpai Kassubag Keuangan dan berdiskusi mengenai Pernyataan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran. Kassubag Keuangan tidak memahami betul unsur-unsur laporan realisasi anggaran sepenuhnya sehingga menyebabkan Kassubbag Keuangan hanya menerapkan unsur-unsur penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada pos Belanja dan pos Pembiayaan saja.⁹

Gambar 1.1 dibawah ini memperlihatkan bahwa Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan belum sesuai dengan Unsur-Unsur Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

⁸ Wawancara dengan Ibu Nurkhairani Hasibuan, SE; selaku Subbag Umum Kepegawaian di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 28 September 2020, pada pukul ±11.00 WIB

⁹ Wawancara dengan Bapak Fahrur Rozi Rangkuti, SE; selaku Subbag Keuangan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 2 Oktober 2020, pada pukul ±11.30 WIB

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL T.A 2019
BULAN DESEMBER 2019**

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
BULAN : Desember

FORM - II

NO	KEGIATAN / NOMOR DIPA	NAMA PROGRAM KEGIATAN	KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN											
			s/d Bulan Lalu				Bulan Ini				s/d Bulan Ini			
			Fisik (%)		Keuangan (Rp)		Fisik (%)		Keuangan (Rp)		Fisik (%)		Keuangan (Rp)	
Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	2.13.2.13.01.78	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	884.227.233	879.272.047	-	-	158.376.477	152.060.898	-	-	742.813.710	721.232.145
	2.13.2.13.01.78.01	Pembelian Jasa Surat Menyurat	-	-	5.226.000	5.226.000	-	-	1.074.000	1.074.000	100	100	6.300.000	6.300.000
	2.13.2.13.01.78.02	Pembelian Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	-	-	47.322.424	51.549.648	-	-	14.666.075	11.226.397	100	100	82.188.540	82.778.245
	2.13.2.13.01.78.03	Pembelian Alat Tulis Kantor	-	-	54.546.360	49.622.310	-	-	10.665.510	10.665.510	100	100	95.241.800	89.317.820
	2.13.2.13.01.78.04	Pembelian Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	-	8.000.000	1.981.470	-	-	-	210.000	100	100	6.000.000	2.191.470
	2.13.2.13.01.78.05	Pembelian Jasa Akomodasi Kantor	-	-	11.840.949	11.840.949	-	-	2.806.271	2.806.271	100	100	14.947.220	14.947.220
	2.13.2.13.01.78.06	Pembelian Barang Cetakan dan Pengandaian	-	-	26.211.850	26.211.850	-	-	4.865.700	4.865.700	100	100	31.077.560	31.077.560
	2.13.2.13.01.78.07	Pembelian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	-	-	3.450.320	3.456.320	-	-	779.220	779.220	100	100	4.246.540	4.246.540
	2.13.2.13.01.78.08	Pembelian Makanan dan minuman	-	-	11.844.000	11.844.000	-	-	5.156.000	4.944.000	100	100	17.000.000	16.789.000
	2.13.2.13.01.78.09	Riset-cetak / Koordinasi dan Konsultasi	-	-	100.779.300	100.529.300	-	-	54.730.700	52.059.600	100	100	155.510.000	152.589.900
	2.13.2.13.01.78.10	Pembelian Jasa Kegiatan Kantor	-	-	317.000.000	317.000.000	-	-	63.400.000	63.400.000	100	100	360.400.000	360.400.000
2	2.13.2.13.01.79	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	194.788.000	191.336.000	-	-	51.246.800	39.191.600	-	-	236.032.600	170.487.600
	2.13.2.13.01.79.05	Pengadaan Peralengkapan Gedung Kantor	-	-	81.253.000	8.253.000	-	-	-	3.000.000	100	100	61.253.000	11.253.000
	2.13.2.13.01.79.06	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	-	40.950.000	40.950.000	-	-	-	-	100	100	40.950.000	40.950.000
	2.13.2.13.01.79.13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	-	-	50.285.000	50.285.000	-	-	43.746.800	29.661.800	100	100	94.029.800	79.944.800
	2.13.2.13.01.79.14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	-	32.300.000	32.300.000	-	-	7.500.000	7.500.000	100	100	39.800.000	39.800.000
3	2.13.2.13.01.80	Program Peningkatan Kualitas Aparatur	-	-	28.330.000	27.550.000	-	-	-	-	-	-	28.330.000	27.550.000
	2.13.2.13.01.80.02	Pengadaan Pakaian Pakaian Korps	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.13.2.13.01.80.03	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	-	-	28.330.000	27.550.000	-	-	-	-	-	-	28.330.000	27.550.000
4	2.13.2.13.01.83	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	17.898.310	-	-	-	11.483.320	27.246.330	-	-	29.991.630	27.246.330
	2.13.2.13.01.83.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	5.917.140	-	-	-	5.929.140.000	-	-	5.917.140	5.929.140	
	2.13.2.13.01.83.05	Penyusunan Rencana	-	-	11.991.170	-	-	-	11.789.170.000	-	-	11.991.170	11.789.170	
	2.13.2.13.01.83.06	Penyusunan Laporan	-	-	-	-	-	11.483.320.000	9.819.020.000	-	-	11.483.320	9.819.020	
	2.13.2.13.01.143	Program Peningkatan Penyelenggara Pelayanan Perizinan Terpadu	-	-	153.024.350	141.658.435	-	-	61.894.880	59.088.455	-	-	214.719.230	200.748.830
	2.13.2.13.01.143.02	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	-	-	140.127.750	129.361.635	-	-	58.507.480	59.068.455	100	100	198.715.290	188.450.330
	2.13.2.13.01.143.06	Pembelian Indeks Kapasitas Masyarakat	-	-	7.687.150	7.087.150	-	-	567.500	-	-	8.254.650	7.087.150	
	2.13.2.13.01.143.07	Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	5.209.450	5.209.450	-	-	2.519.900	-	-	7.749.330	5.209.450	

Seharusnya
Laporan Realisasi Fisik dan
Keuangan Pelaksanaan
Kegiatan
Kabupaten Mandailing Natal
Per 31 Desember 2019

Pencatatan tidak ada
membedakan unsur-
unsur PSAP No. 02
tentang penyajian
laporan realisasi
anggaran yang diatur
dalam PP No. 71 Tahun
2010 yaitu tidak
membedakan antara
Pos-pos Pendapatan
LRA, Transfer, Belanja,
dan Pembiayaan¹⁰

Gambar 1.1 Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal

Dari Gambar 1.1 diketahui bahwa Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010. Terlihat pada judul seharusnya :

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan

Kabupaten Mandailing Natal

Per 31 Desember 2019¹⁰

Selanjutnya Pencatatan tidak ada membedakan unsur-unsur PSAP No. 02 tentang penyajian laporan realisasi anggaran yang diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 yaitu tidak membedakan antara Pos-pos Pendapatan LRA, Transfer, Belanja, dan Pembiayaan.¹¹

Untuk menunjang pengelolaan keuangan daerah secara efisien dan efektif maka perlu penataan anggaran keuangan daerah secara memadai, hal ini dimaksudkan agar dapat menunjang peningkatan kinerja pemerintah. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan staf pegawai agar tercapainya pembangunan daerah yang baik di Kabupaten Mandailing Natal adalah dengan menyusun anggaran keuangan yang memadai dan kesesuaian penyusunan laporan realisasi anggaran yang disusun oleh Kabupaten Mandailing Natal terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.¹²

Maka berdasarkan hasil yang dapat dari hasil Pra Penelitian dan permasalahan di atas menimbulkan dugaan adanya kekurangsesuaian penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mandailing Natal dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran yang di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 dan penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah/ skripsi dengan judul. **“Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran**

¹⁰ PP No. 24 Tahun 2005

¹¹ *Ibid*

¹² Siti Asmiati & Stanley K.Walandouw. “*Evaluasi Penerapan Pernyataan Estándar Akuntansi Pemerintahan Tentag Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara*”, Jurnal EMBA, ISSN: 2303-1174. Vol 3 No.1 2015, h. 418-425.

(Studi Kasus Pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal”.

B. Batasan Masalah

Agar Pembahasan tidak meluas dan mencapai fokus yang diharapkan, penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada lingkup Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesesuaian Penerapan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal dengan Pernyataan Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ?
2. Bagaimana Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah di atas maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian Penerapan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal dengan Pernyataan Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
2. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di Kantor Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal.

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca khususnya mahasiswa Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta dapat berguna bagi banyak pihak tertentu sebagai tambahan referensi atau perbandingan bagi studi-studi yang akan datang.
2. Diharapkan dapat menjadi masukan dan saran bagi para praktisi, akademis dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat menjadi perbandingan bagi penelitian yang lain.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.Akun dalam Jurusan Akuntansi Syariah pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Konsep Akuntansi

Secara umum akuntansi adalah proses pencatatan, pengelompokkan, penjabaran, penyajian data, serta pencatatan transaksi yang berhubungan dengan keuangan yang digunakan untuk proses pencacatan suatu transaksi agar lebih mudah dalam membuat laporan keuangan. Laporan keuangan sangat perlu untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Pada awalnya, laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanyalah sebagai ‘alat penguji’ dari perkerjaan bagian pembukuan, tetapi untuk selanjutnya laporan keuangan tidak hanya sebagai alat penguji saja tetapi juga sebagai dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan tersebut, dimana dengan hasil analisa tersebut pihak-pihak yang berkepentingan mengambil suatu keputusan.¹

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dalam bentuk satuan uang dan menginterpretasikan hasil proses tersebut.² Tujuan utama akuntansi adalah untuk mencatat, melaporkan dan menginter-pretasikan data-data ekonomi untuk digunakan sebagai pengambil keputusan.³

Kemudian akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berdaya guna dalam pengambilan keputusan.⁴

Lalu akuntansi adalah sistem informasi (*accounting is an information system*) yang menyediakan laporan-laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*that provides report to stake holders*) tentang aktivitas-aktivitas

¹ Arfan Ikhsan, dkk. *Analisa Laporan Keuangan*, (Medan: Madenatera, 2018), h. 4

² Sri Rahayu, dkk. *MYOB 13 Jasa dan Dagang*, (Medan: PERDANA PUBLISHING, Cet I, 2011), h. 1

³ Hendra Harmain, Nurlaila, dkk. *Pengantar Akuntansi I*, (Medan :Madenatera, Cet II, 2017), h. 7

⁴ *Ibid*

ekonomi dan keadaan perusahaan (*about the economic activities and conditions of a business*).⁵

Selanjutnya Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, yaitu tentang ekonomi organisasi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan dokumen dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar di antara berbagai alternative arah tindakan.” (*Accounting Principles Board, 1970*).⁶

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi yang bersifat keuanganyang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi dan dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Akuntansi menurut perspektif syariah dalam melakukan pencatatan urusan yang diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 282, disebutkan kewajiban bagi umat mukmin untuk menulis setiap transaksi yang masih belum tuntas (not completed atau non-cash).⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ

بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بَلِغٌ عَدْلٍ

Artinya :

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu melihatnya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”

⁵ Gusti Putu Darya. *Akuntansi Manajemen*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, Cet I, 2019), h. 3

⁶ Indra Bastian. *Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik*, (Jakarta: ERLANGGA, 2007), h. 72

⁷ Hendra Harmain, Layla Syafina, dkk. *Akuntansi Syariah*, (Medan : Madenatera, 2019), h. 4

Dalam ayat ini jelas sekali tujuan perintah ini untuk menjaga keadilan dan kebenaran, artinya perintah itu ditekankan pada kepentingan pertanggung jawaban (accountability) agar pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik, serta adil merata. Al-Qur'an melindungi kepentingan masyarakat dengan menjaga terciptanya keadilan, dan kebenaran. Untuk itu, tekanan dari akuntansi bukanlah pengambilan keputusan (decision making) melainkan pertanggungjawaban (accountability).⁸

2. Konsep Akuntansi Pemerintahan

Secara umum akuntansi pemerintah adalah suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengelompokan, penjabaran, penyajian data, pengikhtisaran, pengklasifikasian, pencatatan transaksi, suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atau suatu informasi.

Akuntansi pemerintah adalah akuntansi pemerintah meliputi aktivitas pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan transaksi-transaksi keuangan pemerintah sebagai suatu kesatuan dari unit-unitnya, serta penafsiran atas hasil aktivitas ini.⁹

Kemudian akuntansi pemerintah adalah proses penyusunan laporan keuangan pemerintah, sedangkan akuntansi pemerintah daerah adalah proses penyusunan laporan keuangan di lingkungan pemerintah daerah.¹⁰

Selanjutnya dalam akuntansi pemerintahan data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislative yudikatif, dan masyarakat.¹¹

Akuntansi pemerintah (termasuk akuntansi untuk lembaga non profit pada

⁸ *Ibid*

⁹ Forum Studi Keuangan Negara. *ESAI KEUANGAN NEGARA Pemikiran Multi Perspektif*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif Angoota IKAPI, Cet. I, 2017), h. 258

¹⁰ Riyanto & Puji Agus. *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua*, (Yogyakarta: PUSTAKA BELAJAR, Cet. I, 2015), h. 25

¹¹ Abdul Halim. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat, 2007), h. 34

umunya) merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba. Akuntansi pemerintah adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan. Akuntansi pemerintah mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah. Akuntan pemerintah menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan negara. Disamping itu, bidang ini meliputi pengendalian atas pengeluaran melalui anggaran negara, termasuk kesesuaiannya dengan UU yang berlaku.¹²

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi pemerintah adalah proses penyusunan laporan keuangan pemerintah meliputi aktivitas pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan transaksi-transaksi keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislative yudikatif, dan masyarakat sebagai suatu kesatuan dari unit-unitnya, serta penafsiran atas hasil aktivitas ini.

3. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP)

1. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah. SAP berbasis akrual yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintahan No. 71 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah ini sudah berlaku

¹² Rizki Arvi Yunita, Sugianto, Kusmilawaty. "Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual sebagai Implementasi PP 71/2012 dalam Penyusunan Laporan Keuangan", Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI), p-ISSN : 2615-1227, e-ISSN : 2655-187X, Vol 3 No. 2 (2019), h. 10

namun instansi pemerintah masih diperkenankan menggunakan Peraturan Pemerintah No, 24 Tahun 2005 SAP berbasis kas menuju akrual, sampai dengan tahun anggaran 2014.¹³

Kemudian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Selain itu, Standar Akuntansi Pemerintah juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan laporan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah tersebut mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut.¹⁴

Selanjutnya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan di Indonesia. Dengan standar ini, laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan stakeholders sehingga tercapai pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.¹⁵

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Standar Akuntansi Pemerintah juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan laporan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah tersebut mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut sehingga tercapai pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

¹³ Dwi Martani, dkk. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h. 18

¹⁴ I Gde Yoga Permana & Ida Ayu Putu Sri Wi dnyani. *Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, Cet. I, 2019), h. 19

¹⁵ Yoyo Sudarso, dkk. *KEUANGAN di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI (Anggota IKAPI), 2017), h. 32

4. Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Secara umum laporan keuangan merupakan pencatatan uang yaitu laporan yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan kredit. Laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penetunannya ditentukan bisa setiap bulan ataupun satu tahun sekali.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan utama laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.¹⁶

Kemudian laporan keuangan daerah merupakan informasi yang memuat data sebagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas ekonomi suatu organisasi pemerintah daerah. Adapun tujuan pelaporan keuangan daerah adalah untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Adapun yang mencakup laporan keuangan daerah adalah: (a) Laporan Keuangan Daerah; (b) Neraca Daerah; (c) Laporan Arus Kas; (d) Catatan Atas Laporan Keuangan.¹⁷

Selanjutnya pada dasarnya laporan keuangan adalah proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan. Selanjutnya, laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil

¹⁶*Ibid*, h. 1-2

¹⁷ Runik Puji Rahayu. "Analisis Atas Laporan Realisasi Anggaran untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan", *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, Vol 1 No. 01 Mei 2016, h. 61

operasi yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.¹⁸

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yaitu proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan. Tujuan utama laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan.

2. Komponen Laporan Keuangan

Sebuah instansi yang baik tentunya didukung dengan berbagai komponen didalamnya tanpa terkecuali laporan keuangan untuk instansi tersebut. Semakin baik dan rinci laporan keuangan instansi maka semakin memberi dampak positif kepada instansi tersebut. Oleh sebab itu hal ini yang membuat laporan keuangan instansi harus dibuat sebaik mungkin. Tetapi diluar sana masih banyak orang yang belum mengetahui tentang laporan keuangan. Komponen-komponen dasar laporan keuangan yaitu : (a) Laporan Laba Rugi; (b) Laporan Perubahan Ekuitas; (c) Neraca; (d) Laporan Arus Kas (Cash Flow); (e) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Berbasis Akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok adalah : (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Arus Kas, (d) Catatan atas Laporan Keuangan.¹⁹

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah dan/atau sebagai kuasa bendaharawan umum negara/daerah.

¹⁸ Aldia Septiana. *Analisis Laporan Keuangan Konsep Dasar dan Deskripsi Laporan Keuangan*, (Jawa Timur : DUTA MEDIA PUBLISHING, Cet. I, 2019), h. 2

¹⁹ Indra Bastian. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, (Jakarta: ERLANGGA, 2005), h. 139

Sementara laporan keuangan surplus-defisit dan laporan ekuitas merupakan laporan keuangan opsional.²⁰

Kemudian komponen laporan keuangan yaitu:

1. Laporan Laba Rugi

Laporan yang menunjukkan penghasilan (pendapatan) dari penjualan, berbagai biaya, dan laba yang diperoleh oleh perusahaan selama periode tertentu. Dalam praktiknya komponen penghasilan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi terdiri dari dua jenis, antara lain:

- (a) Penghasilan (pendapatan) yang diperoleh dari usaha pokok (usaha utama) perusahaan; dan
- (b) Penghasilan (pendapatan) yang diperoleh dari di luar usaha pokok (usaha sampingan) perusahaan.

Sedangkan, untuk komponen pengeluaran (biaya-biaya) juga terdiri dari dua jenis, yaitu antara lain:

- (a) Pengeluaran (biaya) yang dibebankan dari usaha pokok (usaha utama) perusahaan;
- (b) Pengeluaran (biaya) yang dibebankan dari luar usaha pokok (usaha sampingan) perusahaan.²¹

Selanjutnya komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; (g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Dari pernyataan di atas diketahui bahwa komponen-komponen yang terdapat didalam laporan keuangan yaitu : (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan

²⁰*Ibid*

²¹ Aldilla Septiana, h. 18-19

Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; (g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

5. Laporan Realisasi Anggaran

1. Pengertian Laporan Realisasi Anggaran

Kita dapat mengetahui bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode realisasi dan anggaran entitas pelaporan. yang bertujuan untuk memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, unsur yang dicakup oleh Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Laporan realisasi anggaran merupakan salah satu komponen dalam laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi anggaran dalam suatu periode tertentu. Laporan Realisasi Anggaran bagian yang sangat penting dalam suatu perusahaan atau instansi, dimana fungsinya untuk mengetahui keadaan keuangan suatu perusahaan atau instansi. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah ditetapkan melalui PERDA setelah sebelumnya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan realisasi ini merupakan salah satu alat ukur untuk melihat implementasi dari kebijakan pelaksanaan pengelolaan keuangan suatu daerah dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang optimal serta upaya dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.²²

²²Rukayah, dkk. "Analisis Laporan Realisasi Anggaran dengan Menggunakan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi pada Kantor Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang", Jurnal Akuntansi, Vol. 4 No. 2 Juli 2017, h. 2

Lalu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu perusahaan/ instansi, dimana fungsinya untuk mengetahui keadaan keuangan suatu perusahaan/ instansi. Laporan realisasi anggaran adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi, yaitu aktivitas pengumpulan dan pengelolaan data keuangan untuk disajikan dalam bentuk laporan atau ikhtisar-ikhtisar lainnya yang dapat digunakan untuk membantu para pemakainya dalam membuat atau mengambil keputusan.²³

Kemudian Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus / defisit, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dalam anggarannya dalam satu periode.²⁴

Selanjutnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu.²⁵

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Laporan realisasi anggaran merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu perusahaan/ instansi, yang merupakan salah satu komponen dalam laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi anggaran dalam suatu periode tertentu. Laporan Realisasi Anggaran ini menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dalam anggarannya dalam satu periode dan salah satu alat ukur untuk melihat implementasi dari kebijakan pelaksanaan pengelolaan keuangan suatu daerah dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang optimal serta upaya dalam mendorong pembangunan

²³ Astria Nur Jannah Dien, dkk. "Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung", Jurnal EMBA Vol. 3 No. 1 Maret 2015, h. 534-541

²⁴ Indra Bastian. h. 139

²⁵ Syahril Effendi. h. 61

ekonomi daerah. Berfungsi untuk mengetahui keadaan keuangan suatu perusahaan atau instansi.

2. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

Dapat diketahui bahwa tujuan standar laporan realisasi anggaran untuk menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah untuk menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran bagi pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁶

Kemudian tujuan pelaporan realisasi anggaran menurut PSAP No. 02 adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁷

Selanjutnya tujuan dari penetapan standar laporan realisasi anggaran adalah penetapan dasar-dasar penyajian dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka untuk sebagai perwujudan pemenuhan tujuan akuntabilitas publik.²⁸

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan

²⁶ Indra Bastian. *Menggagas Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: PT GELORA AKSARA PRATAMA, 2005), Hal. 139

²⁷ Rukayah, dkk. "Analisis Laporan Realisasi Anggaran dengan Menggunakan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi pada Kantor Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang", *Jurnal Akuntansi*, Vol 4 No 2 Juli 2017, h. 4

²⁸ Ruliaty, dkk. "Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone", *Jurnal Ekonomi Invoice Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, Vol 1 No.1, 2019, h. 41

laporan realisasi anggaran adalah untuk memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan, menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran bagi pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Unsur-Unsur Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam 1 (satu) periode pelaporan. Unsur-unsur Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

1. Pendapatan-LRA

Secara umum Pendapatan –LRA merupakan semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.²⁹

Kemudian Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berazaskan bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan (pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel

²⁹Halkadri Fitra. *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*, (Malang: CV IRDH, Cet. I, 2019), h. 13-14

terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.³⁰

Selanjutnya dalam definisi pendapatan-LRA ini secara jelas disebutkan bahwa titik pengakuan pendapatan-LRA adalah pada saat kas diterima oleh BUN/BUD. dalam mekanisme pendapatan pemerintah, pendapatan memungkinkan dibayarkan langsung oleh pembayar pajak/pembayar pendapatan lainnya ke rekening BUN, namun pembayar pajak/pendapatan lainnya juga difasilitasi untuk membayar melalui bendahara penerimaan entitas pemerintah.³¹

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan-LRA dilaksanakan berazaskan bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan (pengeluaran)).

2. Belanja

Secara umum belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

³⁰*Ibid.* h. 40

³¹*Ibid.* h. 62

Kemudian belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadinya pada saat pertanggungjawaban atau pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi berbendaharaan. Belanja menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.³²

Selanjutnya belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.³³

Dari beberapa pernyataan di atas maka dapat diketahui bahwa belanja adalah oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan.

3. Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Selanjutnya transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

4. Pembiayaan (financing)

Pembiayaan (financing) adalah penerimaan pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dari/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan

³²Seri Perundang-Undangan. *SAP Standar Akuntansi Pemerintah (PP RI NO. 24 TH. 2005)*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Cet. I, 2007), h. 44

³³ h. 41

maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dari hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembiayaan kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.³⁴

**Tabel 2.1 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/
Pemerintah Kota/Dinas
Per 31 Desember**

No	Uraian	Anggaran 20 x 1	Realisasi 20 x 1	(%)	Realisasi 20 x 0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	Xxx	Xx	Xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	Xxx	Xx	Xxx
5	Pend. Hasil pengolahan kekayaan lain-lain PAD yang sah	xxx	Xxx	Xx	Xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	Xxx	Xx	Xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	xxxx	Xxxx	Xx	Xxxx
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	Xxx	Xx	Xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	Xxx	Xx	Xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	Xxx	Xx	Xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	Xxx	Xx	Xxx
15	Jumlah Pendapatan Transfer dan Perimbangan (11 s/d 14)	xxxx	Xxxx	Xx	Xxxx
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	Xxx	Xx	Xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	Xxx	Xx	Xxx
20	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (18 s/d 19)	xxxx	Xxxx	Xx	Xxxx
21					
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	Xxx	Xx	Xxx
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	Xxx	Xx	Xxx
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	xxxx	Xxxx	Xx	Xxxx
26	Total Pendapatan Transfer	xxxx	Xxxx	Xx	Xxxx

³⁴ Halkadri Fitra. *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*, (Malang: CV IRDH, Cet. I, 2019), h. 13-14

	(15+20+25)				
27					
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah	xxx	Xxx	Xx	Xxx
30	Pendapatan Dana Darurat	xxx	Xxx	Xx	Xxx
31	Pendapatan lainnya	xxx	Xxx	Xx	Xxx
32	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)	xxxx	Xxxx	Xx	Xxxx
33	JUMLAH PENDAPATAN (7+26+32)	xxxx	Xxxx	Xx	Xxxx
34					
35	BELANJA				
36	BELANJA OPERASI				
37	Belanja Pegawai	xxx	Xxx	Xx	Xxx
38	Belanja Barang	xxx	Xxx	Xx	Xxx
39	Bunga	xxx	Xxx	Xx	Xxx
40	Subsidi	xxx	Xxx	Xx	Xxx
41	Hibah	xxx	Xxx	Xx	Xxx
42	Bantuan Sosial	xxx	Xxx	Xx	Xxx
43	Jumlah Belanja Operasi	xxxx	Xxxx	Xx	Xxxx
44					
45	BELANJA MODAL				
46	Belanja Tanah	xxx	Xxx	Xx	xxx
47	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	Xxx	Xx	xxx
48	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	Xxx	Xx	xxx
49	Belanja Jalan, irigasi, dan Bangunan	xxx	Xxx	Xx	xxx
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	Xxx	Xx	xxx
51	Belanja Asset Lainnya	xxx	Xxx	Xx	xxx
52	Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)	xxxx	Xxxx	Xx	xxxx
53					
54	BELANJA TAK TERDUGA				
55	Belanja Tak Terduga	xxx	Xxx	Xx	xxx
56	Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)	xxx	Xxx	Xx	xxx
57	JUMLAH BELANJA (43+52+56)	xxxx	Xxxx	Xx	xxxx
58					
59	TRANSFER				
60	TRANSFER HASIL KE DESA				
61	Bagi Hasil Pajak	xxx	Xxx	Xx	xxx
62	Bagi Hasil Retribusi	xxx	Xxx	Xx	xxx
63	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	Xxx	Xx	xxx
64	JUMLAH TRANSFER HASIL KE DESA (61 s/d 63)	xxxx	Xxxx	Xx	xxxx
65					
66	SURPLUS/DEFISIT (33-64)	xxxx	Xxxx	Xx	xxxx
67					
68	PEMBIAYAAN				
69					
70	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
71	Penggunaan SILPA	xxx	Xxx	Xx	xxx
72	Pencairan Dana Cadangan	xxx	Xxx	Xx	xxx
73	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	Xxx	Xx	xxx
74	Pinjaman dalam Negeri-Pemerintah Pusat	xxx	Xxx	Xx	xxx
75	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah	xxx	Xxx	Xx	xxx

	Daerah Lainnya				
76	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	xxx	Xxx	Xx	xxx
77	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	Xxx	Xx	xxx
78	Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi	xxxx	Xxx	Xx	xxx
79	Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya	xxx	Xxx	Xx	xxx
80	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	Xxx	Xx	xxx
81	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	Xxx	Xx	xxx
82	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	Xxx	Xx	xxx
83	Jumlah Penerimaan (71 s/d 82)	xxxx	Xxxx	Xx	Xxxx
84					
85	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
86	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	Xxx	Xx	Xxx
87	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	Xxx	Xx	Xxx
88	Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri-Pemerintah Pusat	xxx	Xxx	Xx	Xxx
89	Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	Xxx	Xx	Xxx
90	Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	xxx	Xxx	Xx	Xxx
91	Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	Xx	Xxx
92	Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri-Obligasi	xxx	Xxx	Xx	Xxx
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya	xxx	Xxx	Xx	Xxx
94	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	Xxx	Xx	Xxx
95	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	Xxx	Xx	Xxx
96	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya	xxx	Xxx	Xx	Xxx
97	Jumlah Pengeluaran (86 s/d 96)	xxx	Xxxx	Xx	Xxx
98	PEMBIAYAAN NETO (83-97)	xxxx	Xxxx	Xx	Xxxx
99					
100	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (66-98)	xxxx	Xxxx	Xx	Xxxx

Sumber : Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005³⁵

³⁵ PP No. 24 Tahun 2005

6. Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran

Secara umum analisis merupakan istilah yang banyak digunakan dalam berbagai ilmu pengetahuan, seperti ilmu bahasa, sosial, ekonomi, bisnis, pengetahuan alam, manajemen, akuntansi, dan lainnya. Analisis berasal dari bahasa Yunani Konu “analisis”, yang artinya “melepaskan. Analisis diartikan sebagai sebuah proses pemeriksaan dan evaluasi dari data atau informasi yang kompleks menjadi bagian yang kecil untuk mempelajarinya lebih dalam dan bagaimana bagian-bagian ini berhubungan satu sama lain.

Analisis adalah memahami seluruh informasi yang terdapat pada suatu kasus, menganalisis situasi untuk mengetahui isu apa yang sedang terjadi, dan memustuskan tindakan apa yang harus segera dilakukan untuk memecahkan masalah.³⁶

Tujuan validasi metode analisis adalah diperolehnya data sesuai dengan tujuannya (*fit for purpose*). Untuk memperoleh data yang valid, seorang analisis harus memperhatikan proses-proses yang terjadi selama analisis. proses analisis dari sampling (pengambilan sampel) dan diakhiri dengan analisis data.³⁷

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa analisis adalah memahami seluruh informasi yang terdapat pada suatu kasus, menganalisis situasi untuk mengetahui isu apa yang sedang terjadi, dan memustuskan tindakan apa yang harus segera dilakukan untuk memecahkan masalah dan diperolehnya data sesuai dengan tujuannya (*fit for purpose*). Untuk memperoleh data yang valid, seorang analisis harus memperhatikan proses-proses yang terjadi selama analisis. proses analisis dari sampling (pengambilan sampel) dan diakhiri dengan analisis data.

³⁶ Freddy Rangkuti. *ANALISIS SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Anggota IKAPI, 1997), h. 14

³⁷ Abdul Rohman. *Validasi dan Penjaminan Mutu Metode Analisis Kimia*, (Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS, Cet. I, 2014), h. 1

Secara umum penerapan adalah perbuatan menerapkan yaitu suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan". Dalam hal ini penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil karya yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktikkan kedalam masyarakat.³⁸

Kemudian penerapan (implementasi) adalah perbuatan menerapkan, atau suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.³⁹

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah perbuatan menerapkan, atau suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain serta tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah. SAP berbasis akrual yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintahan No. 71 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah ini sudah berlaku namun instansi pemerintah masih diperkenankan menggunakan Peraturan Pemerintah No, 24 Tahun 2005 SAP berbasis kas menuju akrual, sampai dengan tahun anggaran 2014.

Kemudian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan persyaratan

³⁸Alfi Parnawi. *Penelitian Tindakan Kelas (Classrom Action Research)*, (Yogyakarta: by Deepublish Publisher, Cet. I, 2020), h. 67

³⁹Velariza Alvioletta, dkk. *Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) Pada Penilaian Kepuasan Berdasarkan Pelayanan Divisi (Studi Kasus: CV Tirta Kencana)*, (Bandung: Kreatif Industri Nusantara, Cet. I, 2020), h. 14

yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indoensia. Selain itu, Standar Akuntansi Pemerintah juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan laporan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah tersebut mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Standar Akuntansi Pemerintah juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan laporan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah tersebut mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut sehingga tercapai pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Jadi, Analisis Penerapan PSAP adalah proses pemeriksaan, evaluasi dan memahami seluruh informasi yang terdapat pada penerapan PSAP. Sedangkan penerapan PSAP adalah menerapkan atau mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain dari PSAP (standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah) yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan.

Laporan realisasi anggaran merupakan salah satu komponen dalam laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi anggaran dalam suatu periode tertentu. Laporan Realisasi Anggaran bagian yang sangat penting dalam suatu perusahaan atau instansi, dimana fungsinya untuk mengetahui keadaan keuangan suatu perusahaan atau instansi. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah ditetapkan melalui PERDA setelah sebelumnya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan realisasi ini merupakan salah satu alat ukur untuk melihat implementasi dari kebijakan pelaksanaan pengelolaan keuangan suatu daerah dalam upaya mewujudkan pelayanan publik

yang optimal serta upaya dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.⁴⁰

Lalu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu perusahaan/ instansi, dimana fungsinya untuk mengetahui keadaan keuangan suatu perusahaan/ instansi. Laporan realisasi anggaran adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi, yaitu aktivitas pengumpulan dan pengelolaan data keuangan untuk disajikan dalam bentuk laporan atau ikhtisar-ikhtisar lainnya yang dapat digunakan untuk membantu para pemakainya dalam membuat atau mengambil keputusan.⁴¹

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Laporan realisasi anggaran merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu perusahaan/ instansi, yang merupakan salah satu komponen dalam laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi anggaran dalam suatu periode tertentu. Laporan Realisasi Anggaran ini menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus / defisit, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dalam anggarannya dalam satu periode dan salah satu alat ukur untuk melihat implementasi dari kebijakan pelaksanaan pengelolaan keuangan suatu daerah dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang optimal serta upaya dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah. Berfungsi untuk mengetahui keadaan keuangan suatu perusahaan atau instansi.

Jadi, Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran adalah proses pemeriksaan, evaluasi dan memahami seluruh informasi yang terdapat pada penerapan PSAP. Sedangkan penerapan PSAP adalah menerapkan atau mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain dari PSAP (standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah) yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan.

⁴⁰ Rukayah, dkk. "Analisis Laporan Realisasi Anggaran dengan Menggunakan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi pada Kantor Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang", Jurnal Akuntansi, Vol. 4 No. 2 Juli 2017, h. 2

⁴¹ Astria Nur Jannah Dien, dkk. "Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung", Jurnal EMBA Vol. 3 No. 1 Maret 2015, h. 534-541

Laporan realisasi anggaran merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu perusahaan/ instansi, yang merupakan salah satu komponen dalam laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi anggaran dalam suatu periode tertentu. Laporan Realisasi Anggaran ini menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dalam anggarannya dalam satu periode dan salah satu alat ukur untuk melihat implementasi dari kebijakan pelaksanaan pengelolaan keuangan suatu daerah dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang optimal serta upaya dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah. Berfungsi untuk mengetahui keadaan keuangan suatu perusahaan atau instansi.

7. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menurut Perspektif Syariah

Istilah anggaran berkaitan dengan konsep perencanaan yang akan di pertanggung jawabkan, perencanaan dalam syari'ah islam adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki dengan manajemen keuangan, yaitu kegiatan perencanaan, penggaran, pemeriksaan, pengelolaan, serta pengendalian, dalam pencarian dan penyimpanan dengan syari'at dan berbasis hukum islam yang dilandasi oleh Al-Qur'an dan Hadist. Sesuatu yang di atur dalam syariat. Sebagaimana perencanaan penganggaran keuangan yang bertujuan untuk mendatangkan kemashlahatan, baik dalam bentuk mewujudkan maupun memelihara kemashlahatan. Dalam hal ini Allah memerintahkan manusia dalam melakukan perencanaan keuangan disebutkan dalam Q.S Al-Furqan ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya :

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”⁴²

⁴² Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Furqan ayat 67

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam mengalokasikan anggaran seharusnya tidak menyimpang dari apa yang sudah di rencanakan. Ayat di atas juga menerangkan bahwa didalam melakukan penganggaran maka harus di anggarkan sesuai dengan kepentingan dan anggaran tersebut dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah di tentukan. Ayat di atas juga menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk bekerja mencari harta sesuai dengan kepentingan saat membelanjakan harta, tidak bersifat lalai sampai mengurangi dari kewajiban sehingga tidak mencukupi, maka dari ini, apabila membelanjakan harta dengan adil dan penuh dengan kebaikan dan tidak berlaku boros.

Selain penjelasan mengenai perencanaan penyusunan anggaran di atas, terdapat juga konsep akuntabilitas anggaran sektor publik, dan ini di jelaskan dalam Q.S surah Al-An'am ayat 135 :

قُلْ يَتَقَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِبِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ ۖ

عَقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿١٣٥﴾

Artinya :

“ wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu yaitu teruslah kau berjalan sesuai jalanmu, akupun akan berbuat demikian, kelak kamu akan tahu siapa yang mendapat tempat terbaik di akhirat nanti, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung di dunia dan di akhirat”⁴³

Juga terdapat dalam Q.S Al-Mudatsir ayat 38 yaitu :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾

⁴³ Tafsir Al-Qur'an Surah Al-An'an ayat 135

Artinya :

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”⁴⁴

Disini dijelaskan bahwa tanggungjawab seseorang berkaitan erat dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Artinya, segala sesuatu yang diperbuat harus mampu dipertanggungjawabkan perbuatannya itu. Begitu juga dengan pemerintah, semakin tinggi kedudukannya di masyarakat maka semakin tinggi pula yang akan menjadi tanggungjawabnya dengan apa yang sudah di anggarkan dalam periode pemerintahnya, serta bertanggungjawab untuk merealisasikannya. Dalam mempertanggungjawabkannya juga harus sesuai prosedur yang telah di tetapkan tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis melakukan penelitian terdahulu terhadap Karya Ilmiah yang telah membahas tentang masalah Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.

Penelitian sebelumnya yang didapat oleh penulis ialah penelitian yang sudah menjadi skripsi yang ditulis oleh Paidi selaku alumni Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul Analisis penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP) No. 02 tentang laporan realisasi anggaran (Studi kasus pada Kantor Kepala Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan). Dalam skripsi tersebut isi yang dibahas ialah membahas tentang penyajian laporan realisasi anggaran Kantor Kepala Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual telah dinilai baik. Namun dalam penyusunan dan penyajian laporan realisasi anggaran Kantor Kepala Desa Amplas tidak menyajikan pos-pos transfer, tidak menyajikan pos-pos pengeluaran pembiayaan, tidak melakukan pemindahan saldo lebih/kurang anggaran ke laporan perubahan saldo anggaran, tidak transaksi mata uang asing ke mata uang rupiah

⁴⁴ Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Mudatsir ayat 38

dan tidak menyusun laporan neraca berbasis akrual yang diatur dalam PSAP No. 02 PP Nomor 71 Tahun 2010.

Kemudian didapat penelitian yang dituangkan dalam bentuk Jurnal yang ditulis oleh Mokhammad Irawan selaku mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang dengan judul Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto). Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang penyajian laporan realisasi anggaran pemerintah Kabupaten Mojokerto telah sesuai dengan PSAP 02 dalam PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2013 melalui pengukuran.

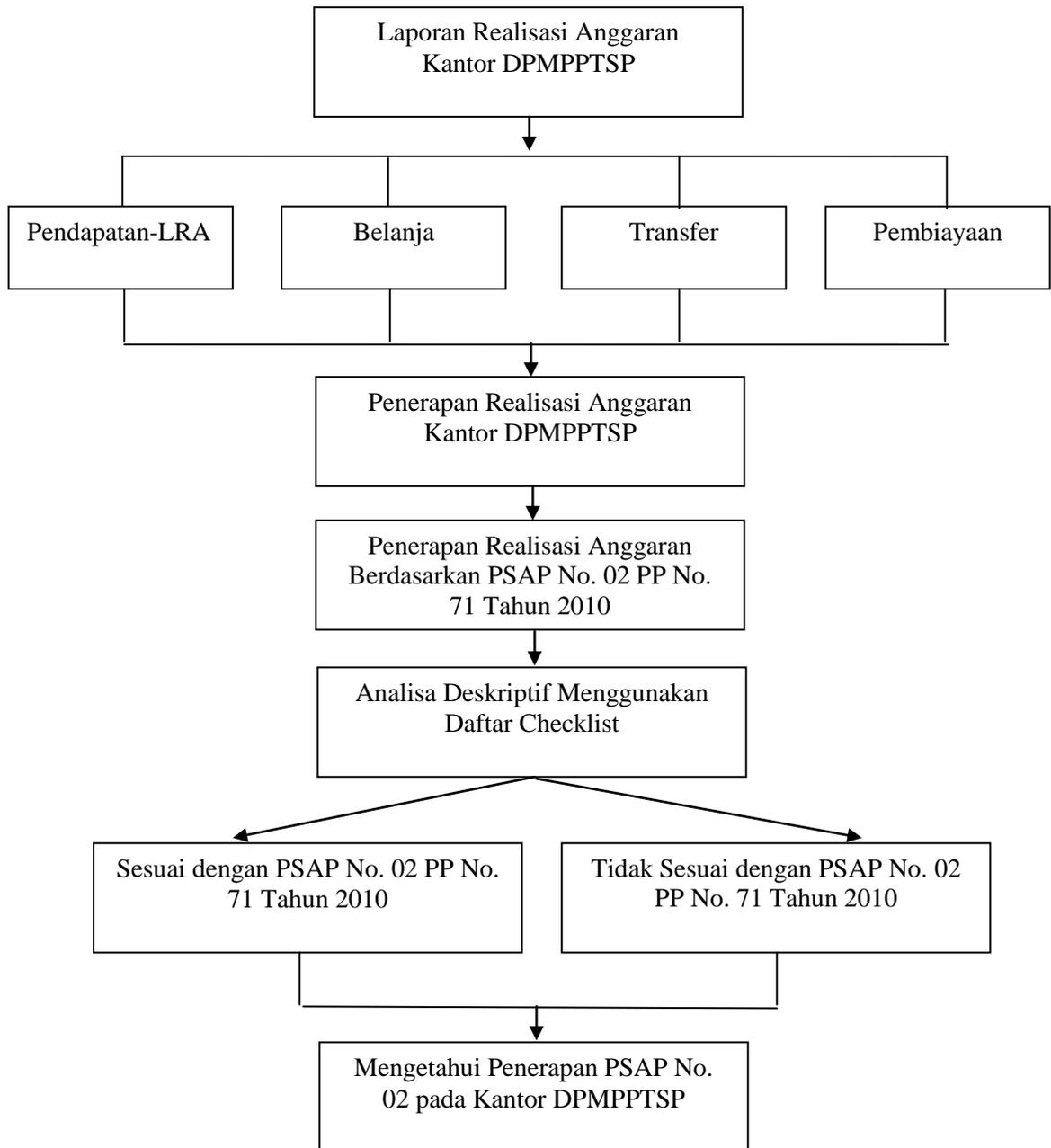
Lalu didapat penelitian yang dituangkan dalam bentuk Jurnal karya Siti Asmianti dan Stanley K. Walandouw selaku mahasiswa/i Universitas Sam Ratulangi dengan judul Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang Kabupaten Minahasa Utara telah menggunakan pencatatan terkomputerisasi yang dibantu oleh aplikasi software yang disebut SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah). Sistem pencatatan yang dilakukan berbasis kas menuju akrual sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005. Penyajian laporan realisasi anggaran pemerintah Kabupaten Minahasa Utara secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAP No. 02 tentang penyajian laporan realisasi anggaran dalam PP No. 24 Tahun 2005.

Selanjutnya didapat penelitian yang dituangkan dalam bentuk Jurnal karya Fitri Anitya Puji Rahayu dan Marliyati selaku mahasiswi Politeknik Negeri Semarang dengan judul Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Laporan Realisasi Anggaran. Dalam penelitian tersebut isi dari Jurnal mengkaji tentang penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam penyajian laporan realisasi anggaran tahun 2011 pada DDPAD Provinsi Jawa Tengah sebagian besar telah sesuai dengan SAP, laporan realisasi anggaran sesuai dengan Permendagri Nomo 13 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, dan Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2009.

Kemudian dapat ditarik kesimpulan, meskipun sudah ada beberapa penelitian tentang Laporan Realisasi Anggaran, akan tetapi dalam penelusuran penulis bahwa yang membahas tentang analisis penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP) No. 02 tentang realisasi anggaran pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu itu belum dikatakan ada, maka untuk itulah penulis tertarik untuk meneliti Analisis penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP) No. 02 tentang laporan realisasi anggaran pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Mandailing Natal.

C. Kerangka Konseptual

Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal menyusun Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan yang terdiri dari unsur-unsur penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Penelitian ini melihat kesesuaian antara penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 terhadap Laporan Realisasi Anggaran Dinas tersebut yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif menggunakan gambaran apa yang didapat dari data kualitatif. Jika hasil penelitian sudah sesuai maka penyusunan laporan realisasi anggaran sudah mengikuti standar dari Peraturan Pemerintah (PP). Tetapi jika ada ketidaksesuaian maka akan diteliti apa yang mempengaruhi Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu belum sesuai penerapannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010. Kerangka pemikiran analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal) dapat digambarkan dalam sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (in- depth analysis), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yaitu bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.¹

Pendekatan Kualitatif ini penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif.²

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Tempat Lokasi Penelitian

Pelaksanaan kegiatan Penelitian bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal yang beralamat di Komplek Perkantoran Bupati Payaloting Kab. Madina.

2. Waktu Kegiatan Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan kegiatan penelitian dimulai Januari 2021 s/d selesai.

¹ Nur Ahmadi Bi Rahmani. *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan : FEBI UIN-SU Press, Cet. I, 2016), h. 4

² *Ibid.*

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah beberapa perangkat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 5 orang seperti Kepala Dinas Drs. Parlin Lubis, AP; Sekretaris Riswan Efendi, SE.MM; Subbag Umum Kepegawaian Nurkhairani Hasibuan, SE; Staf Honorer Setia Budi, SE; dan yang paling utama yaitu Subbag Keuangan Fahrur Rozi Rangkuti, SE.

2. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah laporan realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan kabupaten Mandailing Natal pada Tahun 2019 yang akan menjadi bahan untuk membuat laporan keuangan.

D. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan laporan Realisasi Fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan kabupaten Mandailing Natal pada Tahun 2019 yang disusun oleh Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal. Sumber data yang digunakan untuk mencari jenis data di dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder

- a. Data primer, yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.³Dalam penelitian ini data primernya adalah yang didapat langsung dari Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal dan hasil wawancara.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi. Sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Biasanya data itu dicatat dalam bentuk

³ Husein Umar. h. 42

publikasi-publikasi.⁴ Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, website maupun informasi lainnya yang membahas tentang laporan realisasi anggaran.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data kualitatif. Jenis data kualitatif merupakan data yang disajikan secara deskriptif atau berbentuk uraian⁵. Dalam hal ini yaitu uraian Laporan Realisasi Fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2019 Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian diantaranya :

- a. Dengan cara wawancara, yaitu pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.⁶
- b. Dengan teknik dokumentasi, yaitu cara mencari data atau mencari informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalahm prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan yang lainnya.⁷

⁴ Nar Herhyanto, dkk. *Statistika Pendidikan*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015), h. 1

⁵ Ismail Nurdin, dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), h. 108

⁶ Husein Umar. h. 51

⁷ Jusuf Soewadji. *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Penerbit MItra Wacana Media, 2012), h. 160

F. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisa deskriptif terhadap data penelitian ini, peneliti melakukan tahapan mengumpulkan data-data dan informasi yang berkaitan dengan Laporan Realisasi Anggaran, kemudian menganalisis data dan informasi tentang laporan realisasi anggaran, dan menganalisis penerapan standar akuntansi pemerintah (PSAP) Nomor 02 tentang laporan realisasi anggaran terhadap laporan realisasi anggaran Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya menyimpulkan uraian dari penjelasan yang ada.

Penelitian ini mendeskripsikan kesesuaian antara laporan realisasi anggaran yang dibuat Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal. melalui teknik wawancara dengan daftar checklist yang mendeskripsikan laporan realisasi anggaran berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010.

Untuk keperluan interpretasi hasil jawaban yang dikumpulkan dari hasil wawancara dengan menggunakan daftar checklist, dimana pilihan jawaban yang disajikan adalah Ya dan Tidak dimana jawaban Ya = 1 dan Tidak = 0. Dan untuk menghitung persentase jawaban yang diperoleh dengan menggunakan Rumus Dean J. Champion. Dimana Dean J. Champion mengemukakan sebagai berikut:

- a. 0%-25% : berarti penerapan PSAP Nomor 02 PP No. 71 Tahun 2010 tidak baik.
- b. 25%-50% : berarti penerapan PSAP Nomor 02 PP No. 71 Tahun 2010 kurang baik.
- c. 50%-75% : berarti penerapan PSAP Nomor 02 PP No. 71 Tahun 2010 cukup baik.
- d. 75%-100% : berarti penerapan PSAP Nomor 02 PP No. 71 Tahun 2010 sangat baik.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini merupakan hal yang sangat penting karena mempunyai fungsi untuk menyatakan garis-garis besar masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini di maksudkan agar memperoleh penelitian yang alamiah, dan sistematis. Dalam usulan penelitian ini penulis akan membagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

Bab kedua, landasan teori membahas tentang Kerangka Teoritis, Kerangka Terdahulu, Kerangka Konseptual.

Bab ketiga, berisikan tentang metodologi penelitian diantaranya pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, data, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis dan sistematika pembahasan.

Bab keempat, berisikan tentang profil tempat penelitian, dan hasil penelitian.

Bab lima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah dalam penyusunan ini, selain itu juga ada beberapa saran.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Instansi

1. Sejarah Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal merupakan instansi teknis yang menangani Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Mandailing Natalan Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, dengan demikian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu kabupaten Mandailing Natal diberikan mandate merencanakan, mengembangkan, mengawasi dan mengendalikan serta memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan. Melalui kegiatan investasi dengan berbagai bidang usaha tentu akan mempercepat proses pembangunan, penyediaan lapangan kerja/mengurangi pengangguran yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat Kabupaten Mandailing Natal.

Untuk mencapai tujuan dan cita-cita tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal sebagai instansi teknis yang menangani kegiatan penanaman modal mempunyai 7 (tujuh) pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Penanaman Modal sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota yaitu sebagai berikut :

1. Kebijakan Penanaman Modal:
Tersedianya informasi peluang usaha sektor /bidang unggulan;
2. Kerjasama Penanaman Modal:

Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan anatra Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat provinsi dengan pengusaha nasional/asing;

3. Promosi Penanaman Modal:

Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal provinsi;

4. Pelayanan Penanaman Modal:

Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman;

5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal:

Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha;

6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;

7. Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);

8. Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal:

Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.

2. Visi dan Misi Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal

a. Visi Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal

Sebagaimana diketahui Visi Kabupaten Mandailing Natal yaitu “Mandailing Natal yang berkedaulatan Pangan, Mandiri Ekonomi, Sehat, Cerdas didukung sarana prasarana infrastruktur yang kuat serta masyarakat religious dan berbudaya serta berkelanjutan” Untuk mencapai cita-cita tersebut maka salah satu kondisi yang diharapkan adalah terwujudnya kemandirian ekonomi dari masyarakat Kabupaten Mandailing Natal dimana diharapkan masyarakat mampu menumbuhkan iklim usaha dan investasi.

Berdasarkan hal tersebut maka Visi Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu “Terwujudnya iklim investasi yang kondusif dan pelayanan perizinan yang prima”.

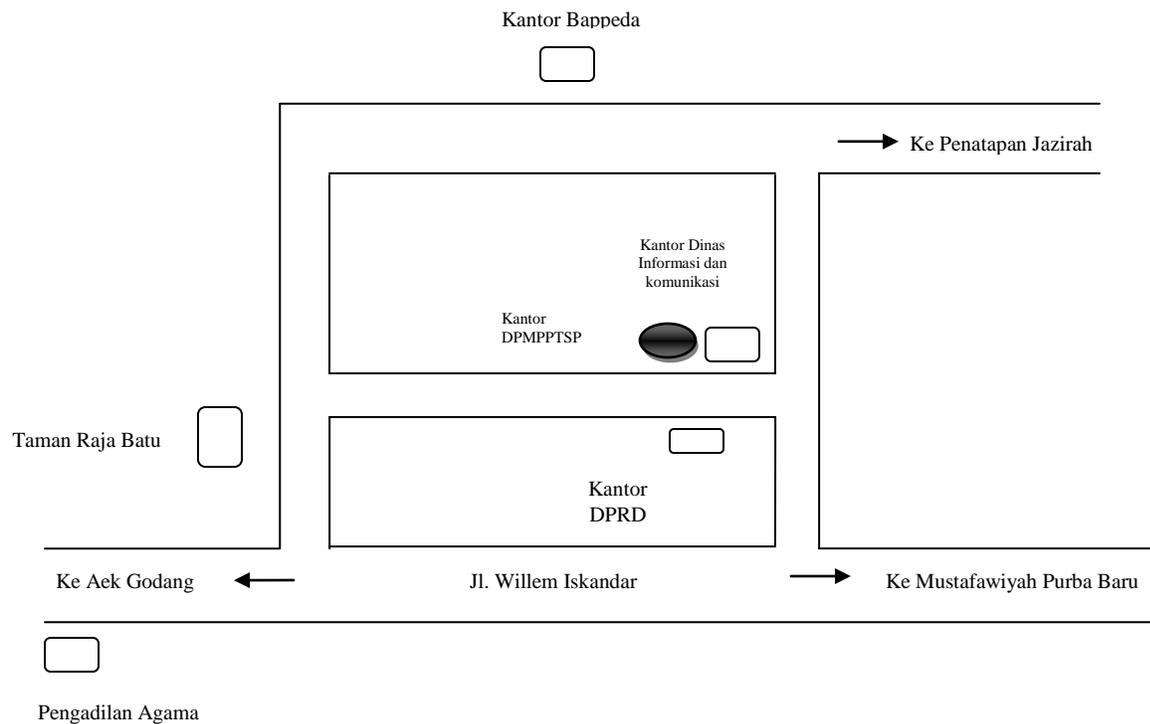
b. Misi Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal

Untuk mencapai visi tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal merumuskan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan perizinan yang prima melalui peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima;
2. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan perizinan yang prima melalui Tumbuh kembangnya iklim usaha dan investasi.
3. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan perizinan yang prima melalui Terciptanya pemerintah yang baik dan bersih;
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan perizinan yang prima melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan Kabupaten Mandailing Natal.

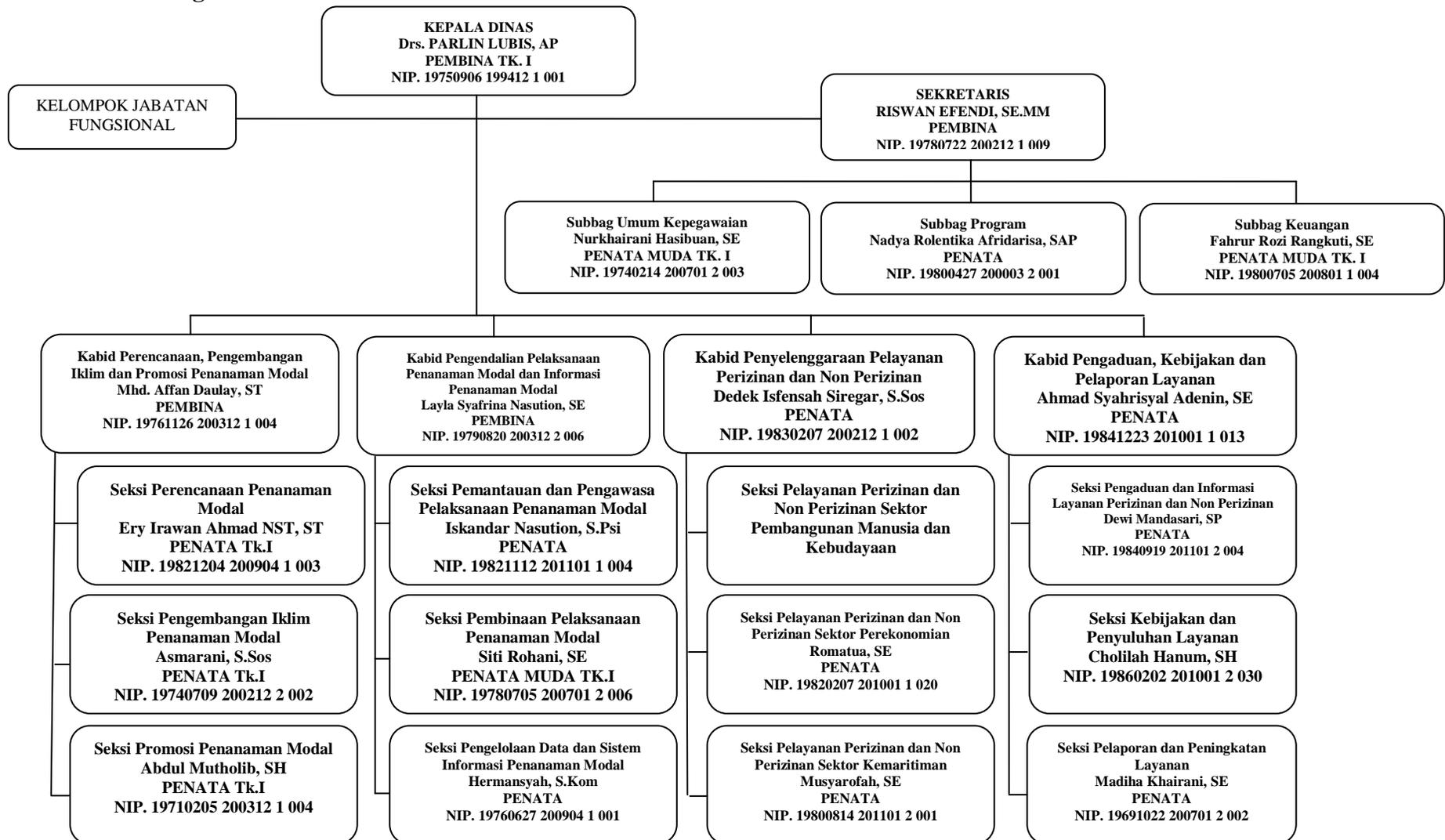
3. Letak Geografis Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal

Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal yang beralamat di Komplek Perkantoran Bupati Paya Loting, Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Denahnya antara lain adalah sebagai berikut :



Gambar 4.1 Denah Lokasi Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

4. Struktur Organisasi di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu

B. Temuan Penelitian

1. Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal dan Penerapan PSAP Nomor 02 PP No. 71 Tahun 2010 di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal

Anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk jangka waktu/periode tertentu di masa yang akan datang.

Prosedur ialah serangkaian aktifitas administrasi yang umumnya melibatkan sebagian orang, untuk menggapai keseragaman tindakan dalam melaksanakan kegiatan rutin. Melalui prosedur data dapat terkumpul serta disampaikan kepada yang memerlukannya. Penyusunan anggaran Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal diharapkan bersumber pada data yang telah melalui prosedur yang tepat. Perihal ini dikenal karena anggaran yang disusun oleh pihak- pihak yang berkompeten dalam bidangnya.

Adapun hasil wawancara dengan Kassubbag Umum Kepegawaian Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal yaitu Ibu Nurkhairani Hasibuan, SE pada tanggal 28 April 2021, pada pukul \pm 11.00 WIB mengatakan:

“Untuk Penyusunan ada tim khususnya, yaitu Kasubbag Keuangan yang dipimpin oleh sekretaris, baru disampaikan laporannya oleh Kepala Dinas dan diserahkan ke bagian akuntansi DPKAD atau Dinas Keuangan, kemudian dijalankan programnya serta dibuat laporan Realisasi pada akhir periodenya.”

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Nurkhairani Hasibuan, SE dapat diambil kesimpulan. Penyusun anggaran Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal sudah menugaskan tim khusus penyusunan anggaran yaitu Kasubbag Keuangan yang dipimpin oleh sekretaris dan di koordinasi langsung oleh Kepala Dinas dan diserahkan ke bagian akuntansi DPKAD atau Dinas Keuangan.

Proses penyusunan laporan pertanggungjawaban pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal dilaksanakan pada akhir periode pelaporan, akan tetapi untuk realisasi kegiatan dilakukan setiap bulan dengan mencatat jumlah anggaran serta kegiatan yang sudah terealisasi. Perihal ini agar anggaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dikontrol sebaik mungkin.

Berdasarkan proses penyusunan anggaran Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal, dapat dilihat bahwa proses penyusunan anggaran ini telah melibatkan bagian Kasubbag Keuangan, hal ini sesuai dengan pedoman khusus dalam penyusunan anggaran dan realisasinya yang diatur dalam Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah revisi pertama Permendagri No. 17 Tahun 2007 perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006. Permendagri No. 21 Tahun 2011 perubahan ke I Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Penerapan PSAP Nomor 02 PP No. 71 Tahun 2010 digunakan dengan membandingkan antara penerapan yang ada pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Dengan kata lain Peraturan Pemerintah merupakan upaya yang konkret untuk mewujudkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara dengan metode menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip- prinsip tepat waktu serta disusun dengan mengikuti standar

akuntansi pemerintah yang diterima secara universal, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 berisikan tentang Laporan Realisasi Anggaran Mengenai Keseuaian Penerapan PSAP No. 02 PP Nomor 71 Tahun 2010 pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan Rumus Dean J. Champion yang mengemukakan tingkat kesesuaian sebagai berikut:

- a. 0%-25% : berarti penerapan PSAP Nomor 02 PP No. 71 Tahun 2010 tidak baik.
- b. 25%-50% : berarti penerapan PSAP Nomor 02 PP No. 71 Tahun 2010 kurang baik.
- c. 50%-75% : berarti penerapan PSAP Nomor 02 PP No. 71 Tahun 2010 cukup baik.
- d. 75%-100% : berarti penerapan PSAP Nomor 02 PP No. 71 Tahun 2010 sangat baik.

Untuk menghitung persentase tingkat kesesuaian berdasarkan Rumus Dean J. Champion yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{\sum \text{Jumlah Jawabannya}}{\sum \text{Jumlah Jawaban Penelitian}} \times 100\% \\ &= \frac{20}{24} \times 100\% = 83\% \\ &= \frac{4}{24} \times 100\% = 17\% \end{aligned}$$

Menurut hasil persentase yang diperoleh dari perhitungan jawaban diatas ialah 83% untuk kesesuaian penerapan standar akuntansi pemerintah, maka penulis menarik kesimpulan bahwa penerapan PSAP Nomor 02 PP Nomor 71 Tahun 2010 pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu telah dinilai baik. Dan adapun ketidaksesuaiannya berdasarkan perhitungan diatas yaitu 17%. Ketidaksesuaiannya ini dikarenakan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam penyajian laporan realisasi anggaran tidak memasukkan pos-pos Pendapatan-LRA, namun bukan berarti dalam

pelaksanaan realisasi anggaran tahun 2019 Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tidak melakukan pendapatan-LRA untuk menutupi kekurangan Pendapatan-LRA, akan tetapi hal ini tidak termasuk kedalam pos pengeluaran pendapatan, pengeluaran pendapatan antara lain pemberian pinjaman pihak ketiga. Kemudian dalam laporan realisasi anggaran yang disusun dan disajikan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tidak menyajikan informasi dan pos-pos transfer. Kemudian Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tidak membukukan transaksi mata uang asing ke dalam mata uang rupiah.

2. Analisis Efektifitas Realisasi Anggaran Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal

Efektivitas berkaitan erat dengan tingkatan keberhasilan suatu kegiatan, sehingga suatu kegiatan akan dilakukan efektif apabila kegiatan tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap keahlian penyediaan layanan publik, yang tidak lain ialah pencapaian target yang sudah ditetapkan maupun direncanakan sebelumnya.

Efektivitas dapat diukur dengan menggunakan teori efektivitas anggaran. Jika rasio efektivitas mencapai 90-100% sehingga dinilai sangat efektif, apabila rasio efektivitas mencapai 75-90% dinyatakan kurang efektif serta seandainya rasio efektivitas kurang dari 60% maka dinilai tidak efektif. Semua telah di sahkan dan menjadi tolak ukur untuk mengukur pemakaian anggaran bersumber pada peraturan menteri Keuangan PMK Nomor. 14/ PMK 02 Tahun 2015 Tentang petunjuk serta Penelaaha Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Semakin tinggi efektivitas maka pengelolaan anggaran akan semakin baik.

Efektivitas anggaran juga bisa diukur dari pelaksanaan disusun berdasarkan Pendapatan Laporan Operasional, Beban, Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari oleh entitas pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dana bagi hasil serta pos luar biasa dan

Laporan Arus Kas.

Pada saat perencanaan anggaran setiap tahun tentu mempunyai tujuan ataupun target yang mau dicapai. Sasaran yang mau dicapai juga disebut dengan efektivitas. Efektivitas suatu anggaran bisa diukur lewat realisasi yang dikeluarkan. Efektivitas suatu organisasi sektor publik dapat diukur dengan membandingkan anggaran dengan realisasi yang dicapai dalam satu periode anggaran. Untuk mengukur kinerja suatu anggaran bisa digunakan teori efektivitas anggaran. Berikut ini merupakan teori efektivitas dengan memanfaatkan analisis variasi (selisih) yaitu:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

Tabel 4.1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019

No.	KET	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	PERSEN
1	Pendapatan	0	0	0	0
2.	Belanja	1.588.978.250	1.386.527.125	202.451.125	87%
3.	Pembiayaan	0	0	0	0

Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk anggaran tahun 2019 anggaran dari pos belanja pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal sebesar Rp. 1.588.978.250.

Berlandaskan tabel di atas menunjukkan jika penyerapan anggaran pada laporan realisasi anggaran untuk pos belanja hanya terserap sebesar Rp 1.386.527.125 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 1.588.978.250. sehingga antara anggaran serta realisasinya ada selisih Rp. 202.451.125. dari anggaran tersebut dapat dilihat jika persentase penyerapan anggaran hanya sebesar 87%. Maksudnya penyerapan anggaran pada laporan realisasi anggaran 2019 kurang efektif.

Adapun hasil wawancara dengan Kassubbag Keuangan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Mandailing Natal yaitu Bapak Fahrur Rozi Rangkuti, SE pada tanggal 4 Mei 2021, pada pukul ± 11.30 WIB mengatakan:

“ Jika untuk realisasi belanja perihal ini disebabkan masih banyaknya tidak terlaksananya kegiatan serta pembiayaan serta belum terlaksananya belanja barang pada sebagian barang dan juga belum sepenuhnya pekerjaan atas kegiatan selesai dilaksanakan serta ada pula kegiatan yang dibatalkan.”

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan jika penyerapan dan realisasi anggaran pemasukan serta belanja yang dilakukan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tidak efektif dengan persentase <60% berdasarkan tingkat efektivitas anggaran. Akan tetapi untuk realisasinya penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penerimaan dana SiLPA di tahun sebelumnya.

C. Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Kesesuaian penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua. Bahwa hasil perhitungan dari teknik analisis menggunakan daftar checklist dengan rumus Dean J. Champion diperoleh tingkat kesesuaian penyusunan dan penyajian laporan 83% dan untuk ketidaksesuaian yaitu 17%, maka penulis mengambil kesimpulan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 PP No. 71 Tahun 2010 pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu telah dinilai baik. Hal ini sesuai dengan kajian terdahulu Skripsi yang ditulis oleh Paidi dengan judul Analisis penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP)

No. 02 tentang laporan realisasi anggaran (Studi kasus pada Kantor Kepala Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan). Dalam skripsi tersebut isi yang dibahas ialah membahas tentang penyajian laporan realisasi anggaran Kantor Kepala Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal telah dinilai baik.

2. Selanjutnya Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010. Hasil perhitungan dari teknik analisis menggunakan daftar checklist dengan rumus Dean J. Champion diperoleh tingkat kesesuaian penyusunan dan penyajian laporan realisasi anggaran Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebesar 83% dan untuk ketidakesuaiannya yaitu 17%. Adapun untuk penerapan kesesuaian tersebut karena Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu telah menyajikan informasi realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, Surplus/Defisit-LRA, Pembiayaan yang dibandingkan dengan anggarannya, menyusun stuktur laporan realisasi anggaran, melakukan pelaporan sekurang-kurangnya srtahun sekali, mengklasifikasikan pos-pos pendapatan, mengklasifikasikan pos-pos belanja, mengklasifikasikan pos-pos surplus/defisit-LRA, mengklasifikasikan pos-pos penerimaan pembiayaan, mengklasifikasikan pos-pos SiLPA/SiKPA, akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, menyediakan informasi tentang indikasi perolehan dan menggunakan sumber daya ekonomi, penyusunannya dilakukan secara efisien, efektif dan hemat, menyusun laporan realisasi anggaran berbasis kas. Sedangkan ketidakesuaiannya sebesar 17% dikarenakan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam penyajian laporan realisasi anggaran tidak memasukkan pos-pos pendapatan, namun bukan berarti dalam pelaksanaan realisasi anggaran tahun 2019 Kantor Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tidak melakukan pendapatan, dalam laporan realisasi anggaran tahun 2019 Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu melakukan pembiayaan untuk menutupi kekurangan pembiayaan anggaran, pengeluaran pembiayaan antara lain pemberian pinjaman pihak ke tiga, penyertaan permodalan pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Kemudian dalam penyusunan dan penyajian laporan realisasi anggaran Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tidak memindahkan selisih lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) ke laporan perubahan saldo anggaran yang seharusnya dilakukan oleh entitas pelaporan, dalam hal ini Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu juga tidak menyusun laporan perubahan saldo anggaran dan langsung memasukkan kedalam pos penerimaan pembiayaan. Kemudian Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tidak menyajikan pos-pos transfer, dalam hal ini Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tidak melakukan transfer untuk tahun berjalan. Kemudian Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tidak menyajikan laporan keuangan berbasis akrual, hal ini dikarenakan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tidak menyusun laporan keuangan sebagai salah satu laporan yang seharusnya disusun pemerintah yang berguna untuk mengontrol asset yang dimiliki. Lalu Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal telah menggunakan pencatatan terkomputerisasi yang dibantu oleh aplikasi software yang disebut SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah. Kemudian Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tidak melakukan pembukuan mata uang asing ke dalam rupiah, bukan berarti

dalam hal ini Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tidak mengikuti standar yang berlaku, namun untuk penyusunan laporan realisasi anggaran tahun 2018 tidak terjadi transaksi dalam mata uang asing.

Hal ini sesuai dengan kajian terdahulu Jurnal karya Siti Asmiati dan Stanley K. Walandouw dengan judul Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang Kabupaten Minahasa Utara telah menggunakan pencatatan terkomputerisasi yang dibantu oleh aplikasi software yang disebut SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah). Sistem pencatatan yang dilakukan berbasis kas menuju akrual sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005. Penyajian laporan realisasi anggaran pemerintah Kabupaten Minahasa Utara secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAP No. 02 tentang penyajian laporan realisasi anggaran dalam PP No. 24 Tahun 2005.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sehubungan dengan pembahasan yang sudah penulis uraikan dari data dan informasi penelitian yang telah terkumpul lalu dianalisis, kemudian ditarik kesimpulan antara lain :

1. Mengacu dari keseluruhan bahwa penyajian laporan realisasi anggaran Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal dengan menerapkan teknik perhitungan daftar checklist dalam rumus Dean J. Champion kesesuaian penerapan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI telah dinilai baik.
2. Penerapan penyajian laporan realisasi anggaran Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal dilakukan sesuai peraturan yang berlaku, dan telah menyajikan unsur-unsur laporan realisasi anggaran. Namun dalam penyusunan dan penyajian laporan realisasi anggaran Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tidak menyajikan pos-pos Pendapatan-LRA, tidak menyajikan pos-pos transfer, tidak melakukan transaksi mata uang asing ke mata uang rupiah dan tidak menyusun laporan neraca berbasis akrual yang diatur dalam PSAP Nomor 02 PP Nomor 71 Tahun 2010.

B. Saran

Dalam hasil penelitian ini penulis menyampaikan saran pada penyajian laporan realisasi anggaran hendaklah berdasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 di dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 supaya laporan realisasi anggarannya handal, terampil, bermanfaat dan memudahkan kaum pengguna ketika mendapat informasi tentang realisasi anggaran entitas pelaporan dan memudahkan untuk menganalisis kinerja pemerintah dalam akuntabilitasnya yang berhubungan dengan anggaran.

1. Kepada Kepala Dinas Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal, sepatutnya sebagai entitas pelaporan saat melaporkan dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan menyajikan laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih atau bahkan menyajikan seluruh laporan keuangan sebagai entitas pemerintah sebagai sarana pertanggungjawaban publik dan terwujudnya pemerintah yang baik/bermanfaat.
2. kiranya untuk menentukan tim penyusun dan penyajian laporan realisasi anggaran kepala Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal menentukan orang yang paham akuntansi dan mengenal teknologi untuk mendukung penyajian laporan dengan berbasis sistem keuangan pemerintah untuk menurunkan salah saji yang kemungkinan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfurkaniati, Lili Safrida, Nasirwan, Hendra Harmain, Nurlaila, Adriani Lande, Sustiani Limaryani, Fajar Rina Sejati, Muthmainnah, Yana Ermawati, Safrita. *Pengantar Akuntansi I*, Medan :Madenatera, Cet II, 2017
- Alvioletta, Velariza, Muhammad Yusril Helmi Setyawan, Muhammad Harry K Saputra. *Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) Pada Penilaian Kepuasan Berdasarkan Pelayanan Divisi (Studi Kasus: CV Tirta Kencana)*, Bandung: Kreatif Industri Nusantara, Cet. I, 2020
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Asmianti, Siti & Stanley K. Walandouw. “ *Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara*”, Jurnal EMBA, Vol 3 No. 1 Maret 2015
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal. *Kabupaten Mandailing Natal dalam Angka Mandailing Natal Regency in Figures 2017*, Mandailing Natal: BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2017
- Bastian, Indra. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Jakarta: ERLANGGA, 2005
- Bastian, Indra. *Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik*, Jakarta: ERLANGGA, 2007
- Bastian, Indra. *Menggagas Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: PT GELORA AKSARA PRATAMA, 2005
- Darya, Gusti Putu. *Akuntansi Manajemen*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, Cet I, 2019
- Dien, Astria Nur Jannah, Jantje Tinangon, Stanley Walandouw. “ *Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung*”, Jurnal EMBA Vol. 3 No. 1 Maret 2015
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Rencana Strategis 2016-2020

- Fitra, Halkadri. *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*, Malang: CV IRDH, Cet I, 2019
- Forum Studi Keuangan Negara. *ESAI KEUANGAN NEGARA Pemikiran Multi Perspektif*, Yogyakarta: Diandra Kreatif Angoota IKAPI, Cet. I, 2017
- Halim, Abdul. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat, 2008
- Harmain, Hendra, Anggriyani, Rasidah, Nurlaila, Hastuti Olivia, Desy Farina, Herry Wahyudi, Layla Syafina, dkk. *Akuntansi Syariah*, Medan : Madenatera, 2019
- Herhyanto, Nar. *Statistika Pendidikan*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015
- Iksan, Arfan, Lili Safrida, Putri Kemala Dewi, Ikhsan Abdullah, Kusmilawati, Hasbiana Dalimunthe. *Analisa Laporan Keuangan*, Medan: Madenatera, 2018
- Irawan, Mokhamad. “*Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013(Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto)*”, Journal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA), ISSN: 2337-56xx. Volume:xx, Nomor:xx
- Martani, Dwi, Sylvia Veronica, Ratna Wardhani Aria Farahmita, Edward Tanujaya. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*, Jakarta: Salemba Empat, 2016
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019
- Palimbongan, Remy R I. “*Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon*”, Journal EMBA, ISSN: 2302-1174, Vol. 7 No. 4 Juli 2019
- Parnawi, Alfi. *Penelitian Tindakan Kelas (Classrom Action Research)*, Yogyakarta: by Deepublish Publisher, Cet. I, 2020
- Permana, I Gde Yoga & Ida Ayu Putu Sri Widnyani. *Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, Cet. I, 2019
- PP No. 24 Tahun 2005
- PP No. 71 Tahun 2010 Pasal 4 ayat 1

- Rahayu, Runik Puji. “*Analisis Atas Laporan Realisasi Anggaran untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan*”, Jurnal Manajemen & Kewirausahaan, Vol 1 No. 01 Mei 2016
- Rahayu, Sri, Hafsa, Zulia Hannum, Anita Ariani. *MYOB 13 Jasa dan Dagang*, Medan: PERDANA PUBLISHING, Cet I, 2011
- Rahmani, Nur Ahmadi Bi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Medan : FEBI UIN-SU Press, Cet. I, 2016
- Rangkuti, Freddy. *ANALISIS SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Anggota IKAPI, 1997
- Riyanto dan Puji Agus. *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual*, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, Cet. I, 2015
- Rohman, Abdul. *Validasi dan Penjaminan Mutu Metode Analisis Kimia*, (Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS, Cet. I, 2014), Hal. 1
- Rukayah, Nugrahini Kusumawati, Raden Irna Afriani. “*Analisis Laporan Realisasi Anggaran dengan Menggunakan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi pada Kantor Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang*”, Jurnal Akuntansi , Vol. 4 No. 2 Juli 2017
- Ruliaty, Ismail Badollahi, A Indah Nurfadillah. “*Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone*”, Jurnal Ekonomi Invoice Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Vol 1 No.1, 2019, Hal. 41
- Septiana, Aldia. *Analisis Laporan Keuangan Konsep Dasar dan Deskripsi Laporan Keuangan*, Jawa Timur : DUTA MEDIA PUBLISHING, Cet. I, 2019
- Seri Perundang-undangan. *SAP Standar Akuntansi Pemerintahan (PP RI NO. 24 TH. 2005)*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, Cet. I, 2007
- Sudarso, Yoyo, Devyanthi Sjarif, Nunung Ayu Sofiati. *KEUANGAN di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Penerbit ANDI (Anggota IKAPI), 2017

Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Penerbit MItra Wacana Media, 2012

Yunita, Rizki Arvi, Sugianto, Kusmilawaty. “*Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual sebagai Implementasi PP 71/2012 dalam Penyusunan Laporan Keuangan*”, *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, p-ISSN : 2615-1227, e-ISSN : 2655-187X, Vol 3 No. 2 (2019)

Umar, Husein. *Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Daftar Checklist

DAFTAR CHECKLIST

Indikator Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realiasi Anggaran PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

No	Uraian Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal menyusun struktur laporan realisasi anggaran yang terdiri dari nama entitas pelaporan atas sarana identifikasi lainnya cakupan entitas pelaporan, periode yang di cakup, mata uang pelaporan, dan satuan angka yang digunakan	✓	
2.	Laporan Realisasi Anggaran Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal menyajikan info realisasi pendapatan-LRA yang diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode	✓	
3.	Laporan Realiasi Anggaran Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal menyajikan info belanja yang diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode	✓	
4.	Laporan Realiasi Anggaran Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal menyajikan info transfer yang diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode	✓	
5.	Laporan Realiasi Anggaran Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal menyajikan info surplus/defisit-LRA yang diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode	✓	
6.	Laporan Realiasi Anggaran Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal menyajikan info pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode		✓

7.	Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal mencatat transaksi mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah		✓
8.	Laporan Realiasi Anggaran disusun sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh pihak Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal	✓	
9.	Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal pada laporan realisasi anggaran mengklasifikasikan pos-pos pendapatan		✓
10.	Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal pada laporan realisasi anggaran mengklasifikasikan pos-pos belanja	✓	
11.	Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal pada laporan realisasi anggaran mengklasifikasikan pos-pos transfer		✓
12.	Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal pada laporan realisasi anggaran mengklasifikasikan pos-pos surplus/defisit-LRA	✓	
13.	Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal pada laporan realisasi anggaran mengklasifikasikan pos-pos penerimaan pembiayaan	✓	
14.	Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal pada laporan realisasi anggaran mengklasifikasikan pos-pos pengeluaran pembiayaan	✓	
15.	Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal pada laporan realisasi anggaran mengklasifikasikan pos-pos pembiayaan neto	✓	
16.	Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal pada laporan realisasi anggaran mengklasifikasikan pos-pos lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	✓	

17.	Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal pada akhir periode pelaporan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran	✓	
18.	Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal pengakuan akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran	✓	
19.	Dalam menyusun laporan realisasi anggaran Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal dapat menyediakan informasi kepada pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi	✓	
20.	Dalam penyusunan laporan realisasi anggaran Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal telah dilaksanakan secara efisien	✓	
21.	Dalam penyusunan laporan realisasi anggaran Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal telah dilaksanakan secara efektif	✓	
22.	Dalam penyusunan laporan realisasi anggaran Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal telah dilaksanakan secara hemat	✓	
23.	Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal menyusun dan menyajikan laporan neraca menggunakan basis akuntansi akrual	✓	
24.	Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal menyusun dan menyajikan laporan realisasi anggaran menggunakan basis akuntansi kas	✓	

LAMPIRAN II : Daftar Wawancara

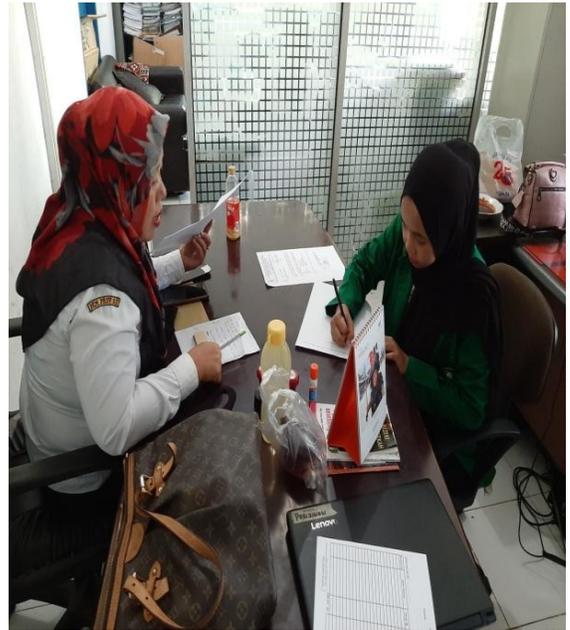
DAFTAR WAWANCARA

1. Siapakah yang menyusun Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Mandailing Natal ?
2. Apakah Kantor DPMPTSP memahami pencatatan akuntansi pemerintahan ?
3. Bagaimana prosedur yang dilakukan Kantor DPMPTSP dalam menyusun dan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran Bu ?
4. Siapa saja pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pelaporan Laporan Realisasi Anggaran Bu ?
5. Kapan dan berapa kali Kantor DPMPTSP melakukan pelaporan Laporan Realisasi Anggaran Bu ?
6. Apakah Laporan Realisasi Anggaran Kantor DPMPTSP Tahun 2019 menyajikan informasi dan pos-pos pendapatan-LRA Bu ?
7. Apakah Laporan Realisasi Anggaran Kantor DPMPTSP Tahun 2019 menyajikan informasi dan pos-pos belanja Bu ?
8. Apakah Laporan Realisasi Anggaran Kantor DPMPTSP Tahun 2019 menyajikan informasi dan pos-pos transfer Bu ?
9. Apakah Laporan Realisasi Anggaran Kantor DPMPTSP Tahun 2019 menyajikan informasi dan pos-pos penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Bu ?
10. Jadi, menurut Ibu, apakah dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Kantor DPMPTSP sudah efisien, efektif dan hemat Bu ?
11. Basis Akuntansi apa yang digunakan dalam menyusun Laporan Realisasi Anggaran Kantor DPMPTSP Tahun 2019 Bu ?
12. Dalam Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Kantor DPMPTSP, adakah terjadi transaksi dalam mata uang asing Bu ? jika ada Apakah dalam pelaporannya diubah ke mata uang rupiah Bu ?

13. Apakah pendapatan Laporan Realisasi Anggaran Kantor DPMPTSP sudah dilakukan secara transparan dan informasi tentang Laporan Realisasi Anggaran mudah untuk diketahui masyarakat ataupun pihak yang berkepentingan Bu ?
14. Apakah terdapat kendala dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Kantor DPMPTSP ini Bu ?
15. Apakah penyajian Laporan Realisasi Anggaran Kantor DPMPTSP, disusun berdasarkan prinsip nilai historis ? yaitu asset dicatat sebesar nilai perolehannya Bu ?
16. Apakah penyajian Laporan Realisasi Anggaran Kantor DPMPTSP, disusun berdasarkan prinsip realisasi Bu ? yaitu pendapatan yang tersedia dalam suatu periode pelaporan akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut Bu ?
17. Apakah penyajian Laporan Realisasi Anggaran Kantor DPMPTSP, disusun berdasarkan prinsip konsisten Bu ? yaitu perlakuan yang sama diterapkan pada transaksi yang serupa dari periode dalam pelaporannya Bu ?
18. Apakah penyajian Laporan Realisasi Anggaran Kantor DPMPTSP, disusun berdasarkan prinsip pengungkapan lengkap Bu ? yaitu Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi secara lengkap yang dibutuhkan oleh pengguna laporannya Bu ?
19. Menurut Ibu, apa fungsi Laporan Realisasi Anggaran ini Bu ?

LAMPIRAN III : Dokumentasi Wawancara

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara Kasubbag Kepegawaian



Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPPMPPTSP) Kabupaten Mandailing Natal

LAMPIRAN IV : Laporan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL T.A 2019
BULAN DESEMBER 2019**

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

BULAN : Desember

FORM - II

NO	KODE KEGIATAN / NOMOR DIPA	NAMA PROGRAM KEGIATAN	KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN											
			s.d Bulan Lalu				Bulan ini				s.d Bulan ini			
			Fisik (%)		Keuangan (Rp)		Fisik (%)		Keuangan (Rp)		Fisik (%)		Keuangan (Rp)	
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2.13.2.13.01.78	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	884.237.233	579.272.047	-	-	158.376.477	152.089.698	-	-	742.613.710	731.332.745
	2.13.2.13.01.78.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	5.225.000	5.225.000	-	-	1.074.000	1.074.000	100	-	6.300.000	6.300.000
	2.13.2.13.01.78.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	-	-	47.322.424	51.549.848	-	-	14.866.076	11.226.397	100	-	62.188.500	62.776.245
	2.13.2.13.01.78.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	-	54.546.360	49.622.310	-	-	10.695.510	10.695.510	100	-	65.241.900	60.317.620
	2.13.2.13.01.78.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perincian Kendaraan Dinas Operasional	-	-	6.000.000	1.981.470	-	-	-	210.000	100	-	6.000.000	2.191.470
	2.13.2.13.01.78.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	-	11.840.949	11.840.949	-	-	2.806.271	2.806.271	100	-	14.647.220	14.647.220
	2.13.2.13.01.78.06	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	-	-	26.211.850	26.211.850	-	-	4.865.700	4.865.700	100	-	31.077.550	31.077.550
	2.13.2.13.01.78.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	-	-	3.466.320	3.466.320	-	-	779.220	779.220	100	-	4.245.540	4.245.540
	2.13.2.13.01.78.08	Penyediaan makanan dan minuman	-	-	11.844.000	11.844.000	-	-	5.156.000	4.944.000	100	-	17.000.000	16.788.000
	2.13.2.13.01.78.09	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	-	100.779.300	100.529.300	-	-	54.733.700	52.059.600	100	-	155.513.000	152.588.900
	2.13.2.13.01.78.10	Penyediaan Jasa Kegiatan Kantor	-	-	317.000.000	317.000.000	-	-	63.400.000	63.400.000	100	-	380.400.000	380.400.000
2	2.13.2.13.01.79	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	184.788.000	131.336.000	-	-	51.248.600	38.181.600	-	-	236.032.600	170.497.600
	2.13.2.13.01.79.05	Pengadaan Peralengkapan Gedung Kantor	-	-	61.253.000	6.253.000	-	-	-	3.000.000	100	-	61.253.000	11.253.000
	2.13.2.13.01.79.06	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	-	40.950.000	40.500.000	-	-	-	-	100	-	40.950.000	40.500.000
	2.13.2.13.01.79.13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	-	-	50.283.000	50.283.000	-	-	43.746.600	28.661.600	100	-	94.029.600	79.944.600
	2.13.2.13.01.79.14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	-	32.300.000	32.300.000	-	-	7.500.000	7.500.000	100	-	39.600.000	39.600.000
3	2.13.2.13.01.80	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	28.350.000	27.550.000	-	-	-	-	-	-	28.350.000	27.550.000
	2.13.2.13.01.80.02	Pengadaan Pakaian Pakaian Korpi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.13.2.13.01.80.03	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	-	-	28.350.000	27.550.000	-	-	-	-	-	-	28.350.000	27.550.000
4	2.13.2.13.01.83	Program Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	17.808.310	-	-	-	11.483.320	27.246.330	-	-	29.391.630	27.246.330
	2.13.2.13.01.93.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	5.917.140	-	-	-	-	5.629.140.000	-	-	5.917.140	5.629.140
	2.13.2.13.01.93.05	Penyusunan Rerja	-	-	11.991.170	-	-	-	-	11.799.170.000	-	-	11.991.170	11.799.170
	2.13.2.13.01.93.06	Penyusunan Laku	-	-	-	-	-	-	11.483.320.000	9.918.020.000	-	-	11.483.320	9.918.020
	2.13.2.13.01.143	Program Peningkatan Penyelenggara Pelayanan Perizinan Terpadu	-	-	163.024.350	141.658.435	-	-	61.694.680	98.088.495	-	-	214.719.230	200.748.930
	2.13.2.13.01.143.05	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	-	-	140.127.750	129.361.635	-	-	58.567.480	59.068.495	100	-	198.715.230	188.450.330
	2.13.2.13.01.143.06	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	7.687.150	7.087.150	-	-	567.500	-	-	-	8.254.660	7.087.150
	2.13.2.13.01.143.07	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	-	-	5.209.450	5.209.450	-	-	2.539.600	-	-	-	7.749.330	5.209.450

NO	KODE KEGIATAN / NOMOR DIPA	NAMA PROGRAM KEGIATAN	KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN												
			s.d Bulan Lalu				Bulan ini				s.d Bulan ini				
			Fisik (%)		Keuangan (Rp)		Fisik (%)		Keuangan (Rp)		Fisik (%)		Keuangan (Rp)		
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6	2.13.2.13.01.148	Program Peningkatan Daya Saling Penanaman Modal	-	-	169.193.854	78.168.854	-	-	18.500.018	6.013.700	100	-	-	185.698.870	81.182.654
	2.13.2.13.01.145.03	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal	-	-	08.489.425	4.489.425	-	-	1.358.000	-	-	-	-	99.844.425	4.489.425
	2.13.2.13.01.145.04	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	-	-	40.247.304	40.222.304	-	-	6.368.719	-	-	-	-	48.018.020	40.222.304
	2.13.2.13.01.145.05	Pengumpulan Data Potensi Penanaman Modal	-	-	30.459.125	30.458.125	-	-	8.781.300	6.013.700	100	-	-	39.239.425	39.471.925
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	2.13.2.13.01.148	Program Pengembangan Data, Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	-	-	126.389.268	126.389.268	-	-	23.781.944	21.891.700	-	-	-	152.171.210	147.870.968
	2.13.2.13.01.146.01	Pengembangan Final Jaringan Aplikasi DPMPPTSP	-	-	74.700.000	74.700.000	-	-	17.775.000	17.775.000	100	-	-	92.475.000	92.475.000
	2.13.2.13.01.146.02	Penyelenggaraan Pameran Penanaman Modal Dalam / Luar Daerah	-	-	42.195.106	42.195.106	-	-	8.009.944	3.806.700	-	-	-	50.202.050	48.001.806
	2.13.2.13.01.146.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Promosi Investasi	-	-	9.494.160	9.494.160	-	-	-	-	-	-	-	9.494.160	9.494.160
		J U M L A H			1.263.889.013	1.081.374.602	-	-	328.089.237	305.152.923	-	-	-	1.588.978.250	1.388.627.123

Panyabungan, 2019

KEPALA DIVAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Drs. PARLIN LUBIS, AP
PEMBINA TK.I
NIP. 19750906 199412 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate 20171
Telp. (061) 8816883-8822826 Fax. 8816883

Nomor : B-3653/EB.MKS.02/09/2020

18 September 2020

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

**Yth. Bapak/Ibu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama	: Adinda Sari Mardison
NIM	: 0602171003
Tempat/Tanggal Lahir	: Kota Pematangsiantar, 02 Oktober 1988
Program Studi	: Akuntansi Syariah
Semester	: VII (Tujuh)
Alamat	: Jl. Siberoar, Lingkar Barat Kelurahan Panyabungan Tengah Kecamatan Panyabungan

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi yang berjudul:

***Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP)
No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus pada Kantor
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mandailing Natal)***

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 18 September 2020

s.n. DEKAN
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan



Digital Signat

Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag
NIP. 197604232003121002

Lampiran:

- Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

KOMPLEK PERKANTORAN PAYALOTING KODE POS 22978 PANYABUNGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

E-mail : dmpmptsp.madina@gmail.com Website :

Panyabungan, 11 Nopember 2020

Nomor : 503/596 /DMPMPTSP/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Persetujuan Izin Melaksanakan Riset**

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam UINSU Medan
di -
Tempat

Menindaklanjuti surat Wakil Dekan Bidang Akademik Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor B-3653/EB.I/KS.02/09/2020 Tanggal 18 September 2020 Permohonan Izin Riset.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, disampaikan kepada Saudara bahwa kami bersedia menerima Mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan Riset dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Adinda Sari Nasution
NIM : 0502171003
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi/Smt : Akuntansi Syariah / VII (tujuh)
Alamat : Jln. Sibaroar Lintas Barat Panyabungan Tonga
No. HP : 082267857178

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih .

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**



[Signature]
Drs PARLIN LUBIS, AP
PEMBINA Tk. I
NIP. 19750609 199412 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : ADINDA SARI NASUTION

Tempat/Tanggal Lahir : Pematang Siantar / 02 Oktober 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Jln. Sibaroar / Lintas Barat, Panyabungan Tonga,
Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal

B. Nama Orang Tua

Ayah : PIRGONG MATUA NASUTION

Ibu : MUHIBBAH LUBIS

Alamat Orang Tua : Jln. Sibaroar / Lintas Barat, Panyabungan Tonga,
Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal

Pekerjaan Orang Tua : 1. Ayah : Wiraswasta
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

C. Riwayat Pendidikan

1. TK RA / Raudhatul Atfal Al-Qur'an Iqra' Pematang Siantar Tamat Tahun 2005
2. SD Negeri No. 122338 Pematang Siantar selama 2 setengah Tahun 2008
3. SDN 081 Panyabungan Tamat Tahun 2011
4. SMP Negeri 2 Panyabungan Tamat Tahun 2014
5. MAN Panyabungan Tamat Tahun 2017
6. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Jurusan S-1 Akuntansi Syariah
Tamat Tahun 2021

